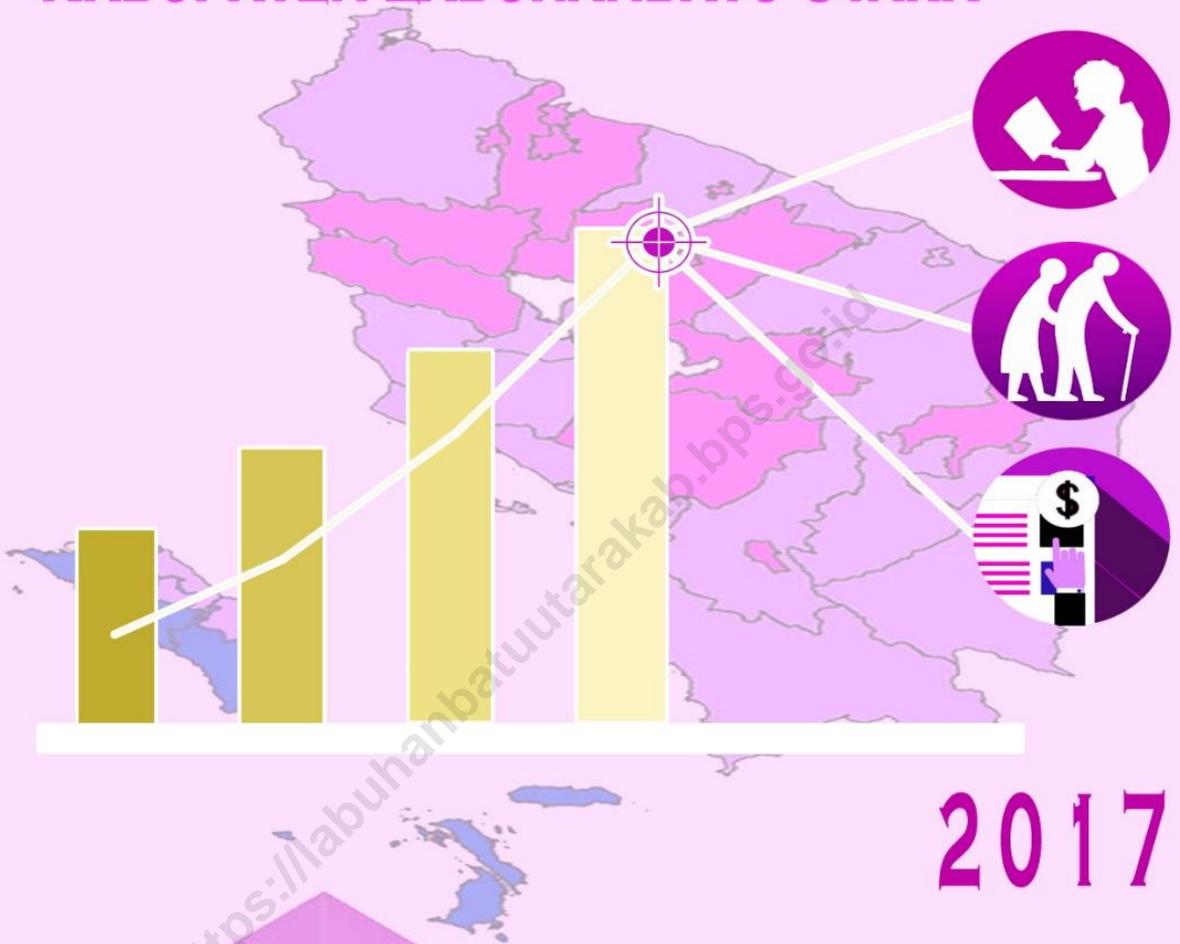


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



2017

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2017

ISSN : 2620-9330
Katalog BPS : 4102002.1223
No. Publikasi : 12230.1814
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 82 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara

Desain Cover Oleh:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Ilustrasi Cover:

Ikon Pembangunan Manusia

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pencetak :

Percetakan JOY

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara”

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara 2017 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis singkat dan padat yang memuat hasil atau capaian pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mencakup aspek pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi menghitung IPM dengan metode baru. Untuk menjaga kesinambungan series angka IPM metode baru, maka dilakukan backcasting IPM tahun 2010 sampai dengan 2013. Publikasi ini menampilkan data runtun waktu mengenai perkembangan pembangunan manusia di Labuhanbatu Utara.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Labuhanbatu Utara yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara 2017” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Aek Kanopan, Desember 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Labuhanbatu Utara



Rika Ventina, SE, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Bab 1 Gagasan Pembangunan Manusia	
1.1 Ide Dasar	3
1.2 Definisi Pembangunan Manusia	4
1.3 Mengukur Pembangunan Manusia	5
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Inovasi dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	
2.1 Perjalanan Penghitungan IPM.....	11
2.2 Perubahan Metodologi IPM	13
2.3 Komponen IPM	18
2.4 Penyusunan IPM	22
Bab 3 Status Pembangunan Manusia	
3.1 Status Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara	27
3.2 Posisi Labuhanbatu Utara	28
3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	34
Bab 4 Kemajuan Pembangunan Manusia	
4.1 Tren Terbaru Pembangunan Manusia melalui Lensa IPM	39
4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia	40
4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik	40

4.4 Pendidikan Memperluas Peluang	44
4.5 Kenaikan Standar Hidup	48
Bab 5 Disparitas Pembangunan Manusia di Kawasan Pantai Timur	
5.1 Gambaran Umum Wilayah Labuhanbatu Utara	55
5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur	56
5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Kawasan Pantai Timur	59
5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota ...	63
LAMPIRAN	69

<https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	12
Gambar 3.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	29
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	30
Gambar 3.3	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	31
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	32
Gambar 3.5	Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017 (juta rupiah)	33
Gambar 3.6	IPM Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2017.....	35
Gambar 3.7	Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	36
Gambar 4.1	Perkembangan IPM Labuhanbatu Utara, 2013-2017	39
Gambar 4.2	Perkembangan Angka Harapan Hidup Labuhanbatu Utara, 2013-2017	41
Gambar 4.3	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah KAwIn Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Labuhanbatu Utara, 2017	43
Gambar 4.4	Persentase Balita yang Pernah di Imunisasi di Labuhanbatu Utara, 2017	44
Gambar 4.5	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Labuhanbatu Utara, 2013-2017.....	45
Gambar 4.6	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Labuhanbatu Utara, 2013-2017	46

Gambar 4.7	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Partisipasi Sekolah di Labuhanbatu Utara, 2017	47
Gambar 4.8	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Labuhanbatu Utara, 2016-2017	48
Gambar 4.9	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Labuhanbatu Utara, 2013-2017 (juta rupiah)	49
Gambar 4.10	Perkembangan PDRB per Kapita Labuhanbatu Utara, 2013-2017 (juta rupiah)	50
Gambar 4.11	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Labuhanbatu Utara, 2013-2017	51
Gambar 5.1	IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur, 2017	57
Gambar 5.2	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017	59
Gambar 5.3	Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017	60
Gambar 5.4	Perkembangan Selisih HLS dan RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017	62
Gambar 5.5	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017	63
Gambar 5.6	IPM Kawasan Pantai Timur Menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2017	64
Gambar 5.7	Perbandingan IPM kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur Menurut Status IPM, 2017	65

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik	14
Tabel 2.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	15
Tabel 2.3	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	21
Tabel 2.4	Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	22
Tabel 3.1	Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	27
Tabel 4.1	Perubahan Status Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara, 2013-2017	40
Tabel 4.2	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Labuhanbatu Utara, 2016-2017	42
Tabel 4.3	Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Labuhanbatu Utara, 2016-2017	47
Tabel 5.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Labuhanbatu Utara	55
Tabel 5.2	Status IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur	58

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017	71
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2016	72
Lampiran 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2015	73
Lampiran 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2014	74
Lampiran 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2013	75
Lampiran 6	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2017	76
Lampiran 7	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2016	77
Lampiran 8	Persentase Balita yang Pernah Imunisasi dan Rata-rata Pemberian Asi Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017	78
Lampiran 9	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017	79
Lampiran 10	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016-2017	80
Lampiran 11	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017	81
Lampiran 12	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2013-2017	82

**DEFINISI
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

**MANFAAT
IPM**

**MENGUKUR
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

SISTEMATIKA

G A G A S A N PEMBANGUNAN MANUSIA

1

"Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang". (Human Development Report 1990)

BAB 1

GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pembangunan manusia salah satunya berupa suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*).

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

1.2 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (*HDR 1990 halaman 10*).

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer dengan pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variabel inti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Alat ukur ini diluncurkan oleh *Mahbub ul Haq* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi). Strategi bidang pendidikan, yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritasnya yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya meliputi tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, tenaga kerja (*employment*), kesehatan dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis IPM Labuhanbatu Utara metode baru selama periode 2012-2016, baik Kabupaten Labuhanbatu Utara maupun menurut kabupaten/kota. Untuk melihat perkembangan IPM secara lebih utuh, menyajikan kondisi sosial ekonomi, perkembangan IPM dan komponennya, kemajuan

pembangunan manusia dan disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 menyajikan ide dasar penulisan yang menguraikan manfaat peningkatan kualitas modal manusia dalam pembangunan daerah. Inovasi dalam pengukuran pembangunan manusia akan disajikan pada Bab 2, yaitu bab yang menguraikan tentang perubahan metodologi IPM metode baru. Selanjutnya pada Bab 3 akan disajikan status pembangunan manusia Labuhanbatu Utara. Kemajuan pembangunan Labuhanbatu Utara akan disajikan pada Bab 4 beserta analisis dan pembahasan secara deskriptif. Terakhir, Bab 5 yang menguraikan disparitas pembangunan manusia di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara.

IPM

Harapan
Lama
Sekolah

Rata-rata
Lama
Sekolah

Pengeluaran
per
Kapita

Angka Harapan
Hidup
Saat Lahir

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2

**Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM,
maka semakin cepat pula peningkatan IPM**

BAB 2

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1 Perjalanan Penghitungan IPM

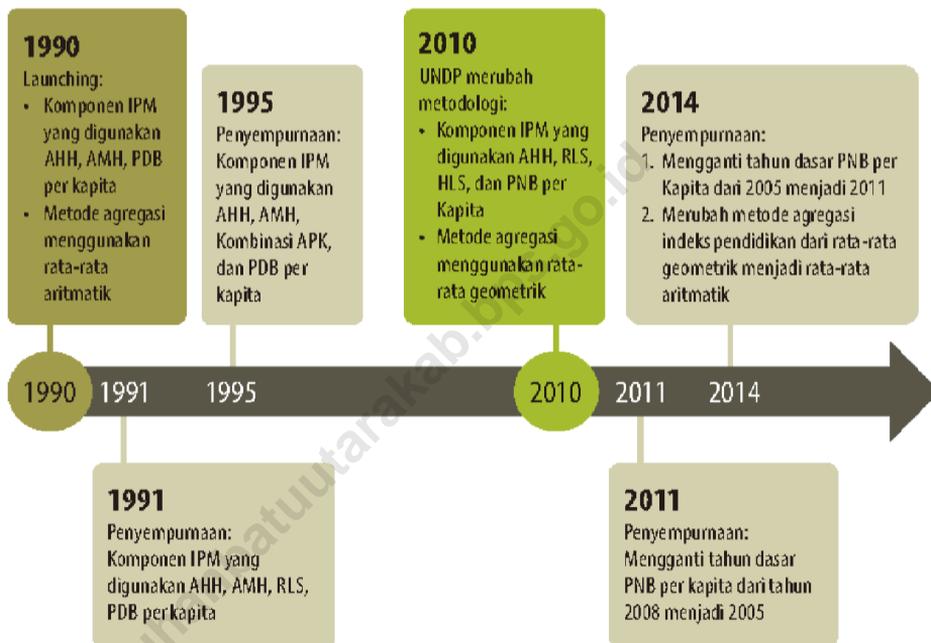
Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup

relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir
 AMH : Angka Melek Huruf
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah
 PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 PNB : Produk Nasional Bruto

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah.

Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2015. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan untuk membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

2.2 Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar. **Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk

lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$. Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Melek Huruf (AMH) • Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

PERBANDINGAN IPM METODE LAMA & METODE BARU

METODE LAMA

METODE BARU

Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)



Angka Harapan Hidup
saat Lahir (AHH)

Angka Melek Huruf (AMH)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15+



Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25+

Pengeluaran per Kapita:
27 Komoditas PPP



Pengeluaran per Kapita:
96 Komoditas PPP

Rata-rata Aritmatik



Rata-rata Geometrik

Reduksi *Shortfall* (RSF)



Pertumbuhan Aritmatik

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. **Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

2.3 Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan

angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

b.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan

UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel 2.3 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/ vetsin	Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

2.4 Penyusunan IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{maxmin})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{maxmin})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di TolikaraPapua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan *reduksi shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

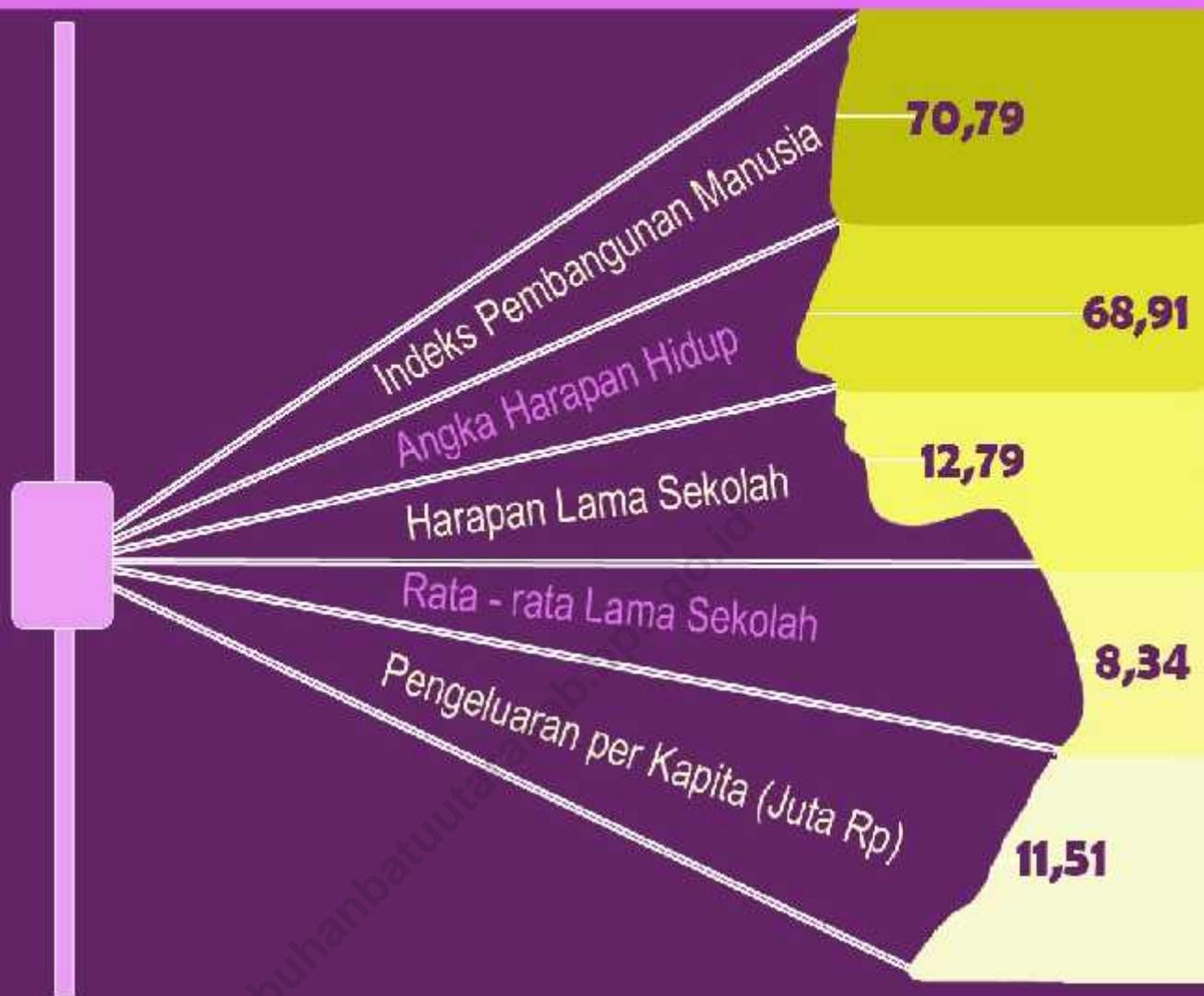
Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (7)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$



STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

3

Indeks Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara mencapai 70,79 pada tahun 2017. Labuhanbatu Utara berada pada posisi tiga belas dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara

BAB 3

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Status Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti kabupaten atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Indeks Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara mencapai 70,79 pada tahun 2017. Dengan capaian IPM itu, Labuhanbatu Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi” sama seperti pada tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Labuhanbatu Utara pada posisi tiga belas dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 mencapai usia 68,91 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Labuhanbatu Utara telah menempuh pendidikan hingga 8,34 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas III. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,79 tahun atau mencapai Diploma I.

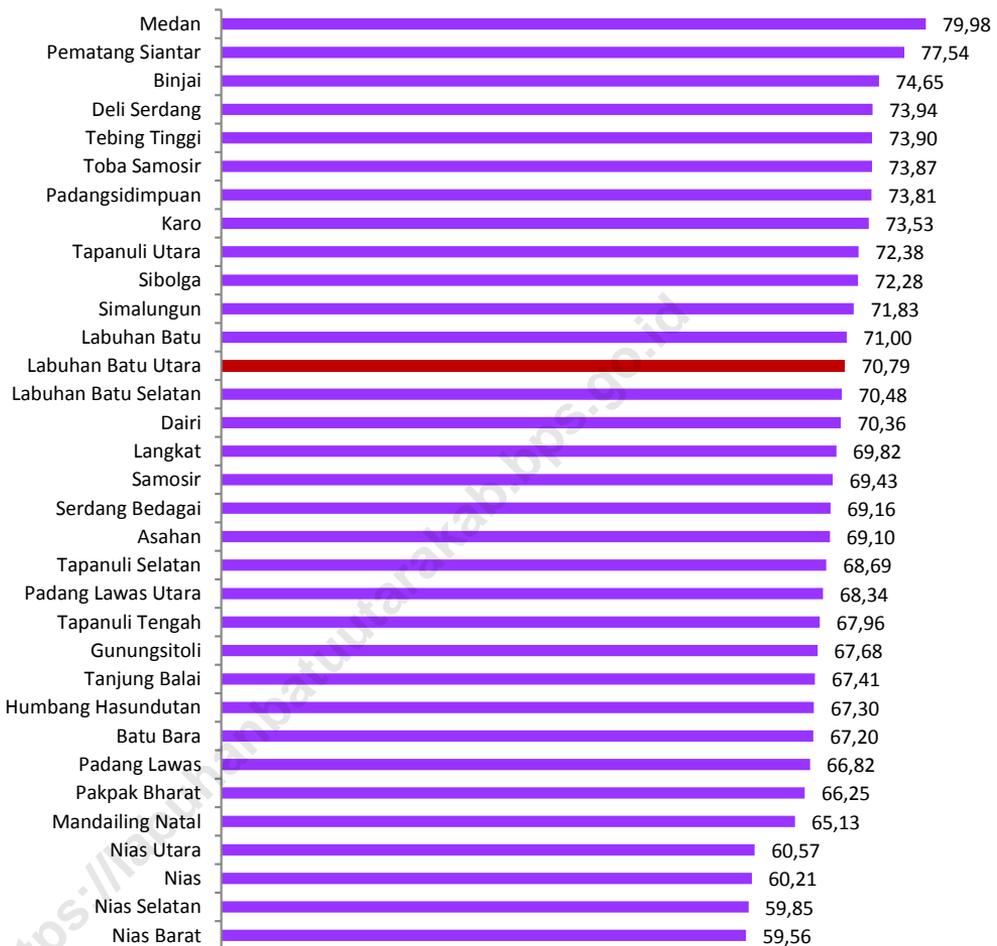
Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Labuhanbatu Utara sebesar 11,51 juta rupiah per tahun.

3.2 Posisi Labuhanbatu Utara

Indeks Pembangunan Manusia di Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 telah mencapai 70,79 dan sudah berstatus “tinggi”. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 79,98. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 59,56.

IPM Labuhanbatu Utara tahun 2017 lebih rendah dibanding dua belas kabupaten/kota lain seperti Medan, Pematang Siantar, Binjai dan seterusnya seperti ditunjukkan gambar 3.1. Di tingkat kabupaten/kota, Labuhanbatu Utara menduduki ranking ke 13, dan angka IPM tersebut sedikit di atas angka Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 70,57.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017

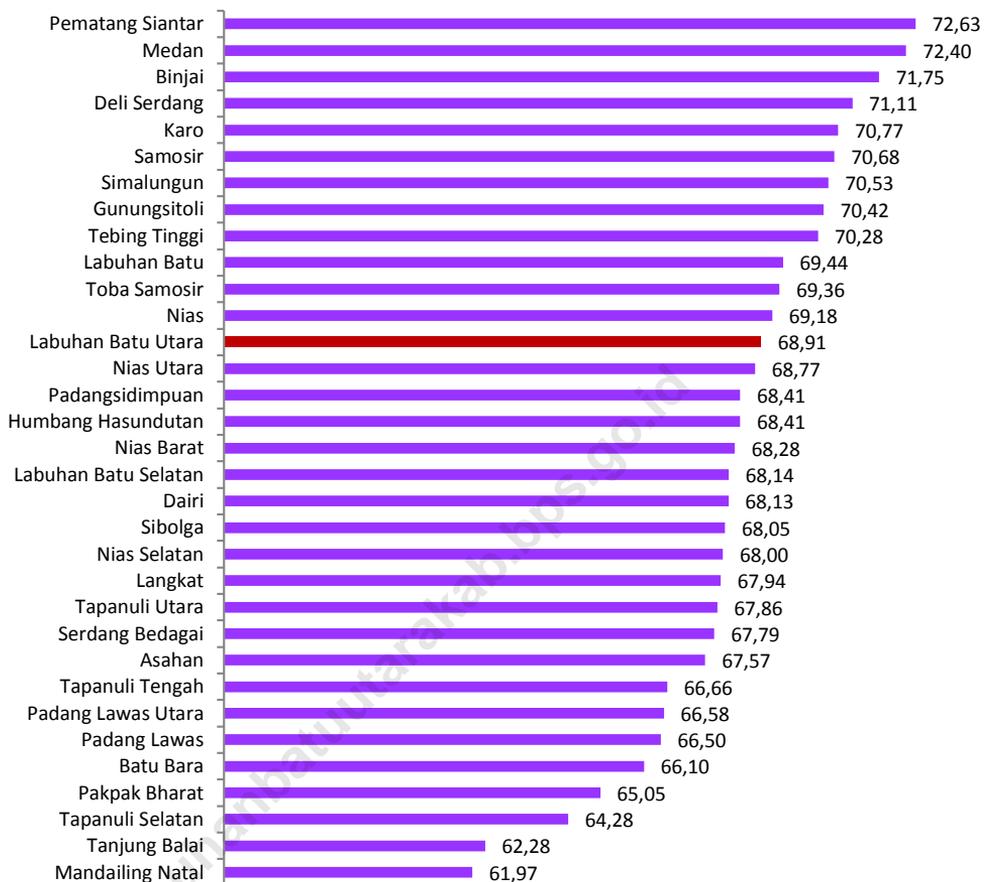


Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

a. Angka Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka harapan hidup Labuhanbatu Utara tahun 2017 yaitu 68,91 tahun, berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 68,37 tahun. AHH Labuhanbatu Utara berada di urutan 13 pada tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

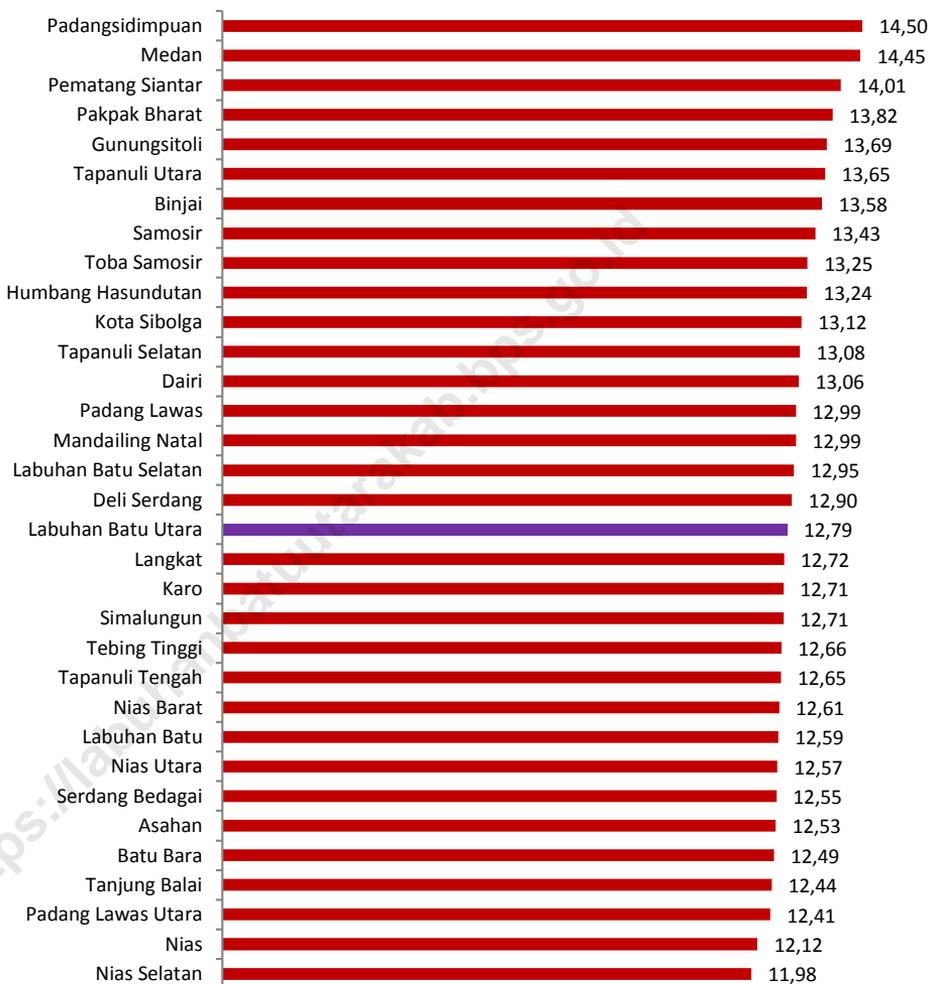
Angka harapan hidup (AHH) tertinggi di Sumatera Utara yaitu Kota Pematang Siantar yang mencapai 72,63 tahun. Sedangkan AHH paling rendah adalah kabupaten Mandailing Natal yaitu 61,97 tahun. AHH Labuhanbatu Utara tergolong cukup bagus karena berada pada posisi menengah ke atas.

b. Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Labuhanbatu Utara mencapai

12,79 tahun. HLS Labuhanbatu Utara ini sangat perlu untuk ditingkatkan karena masih berada di bawah HLS Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 13,10 tahun.

Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017

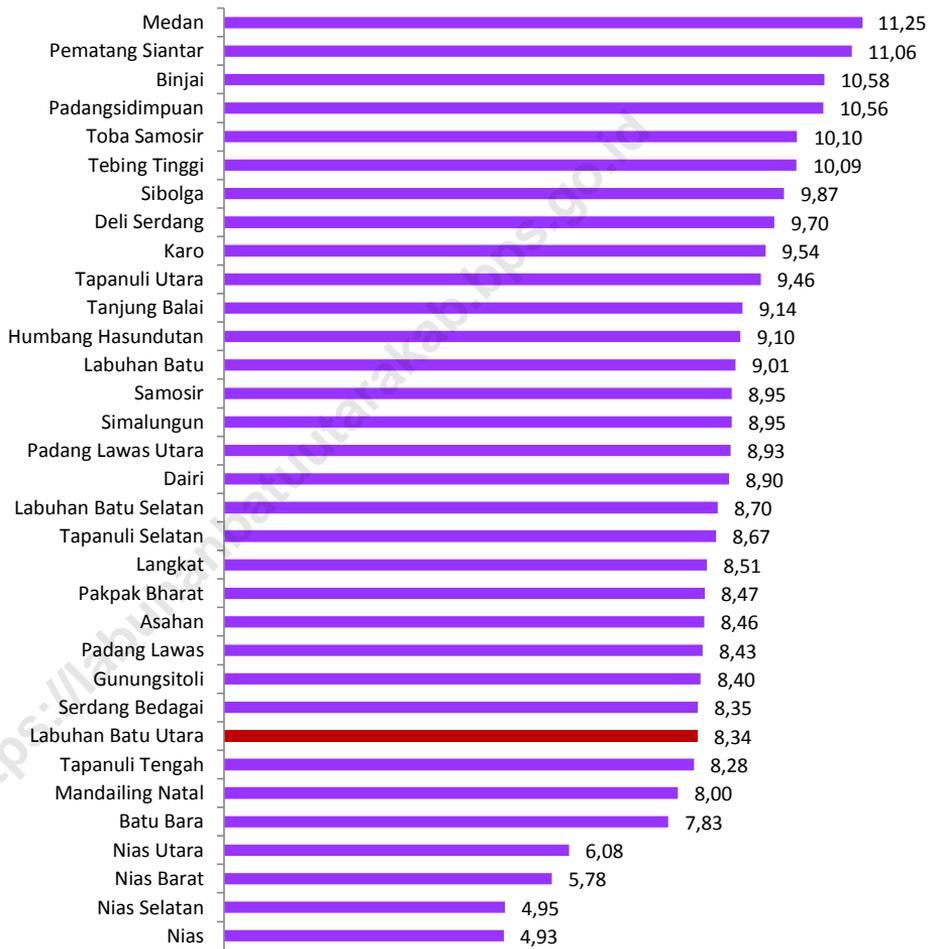


Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, harapan lama sekolah Labuhanbatu Utara tahun 2017 menduduki peringkat ke 18 teratas. HLS tertinggi di kota Padangsidimpuan mencapai 14,50 tahun, sedangkan HLS terendah di kabupaten Nias Selatan yang hanya 11,98 tahun.

Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Labuhanbatu Utara bersekolah selama 8,34 tahun atau mencapai SMP kelas III pada tahun 2017. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Labuhanbatu Utara masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 9,25 tahun.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

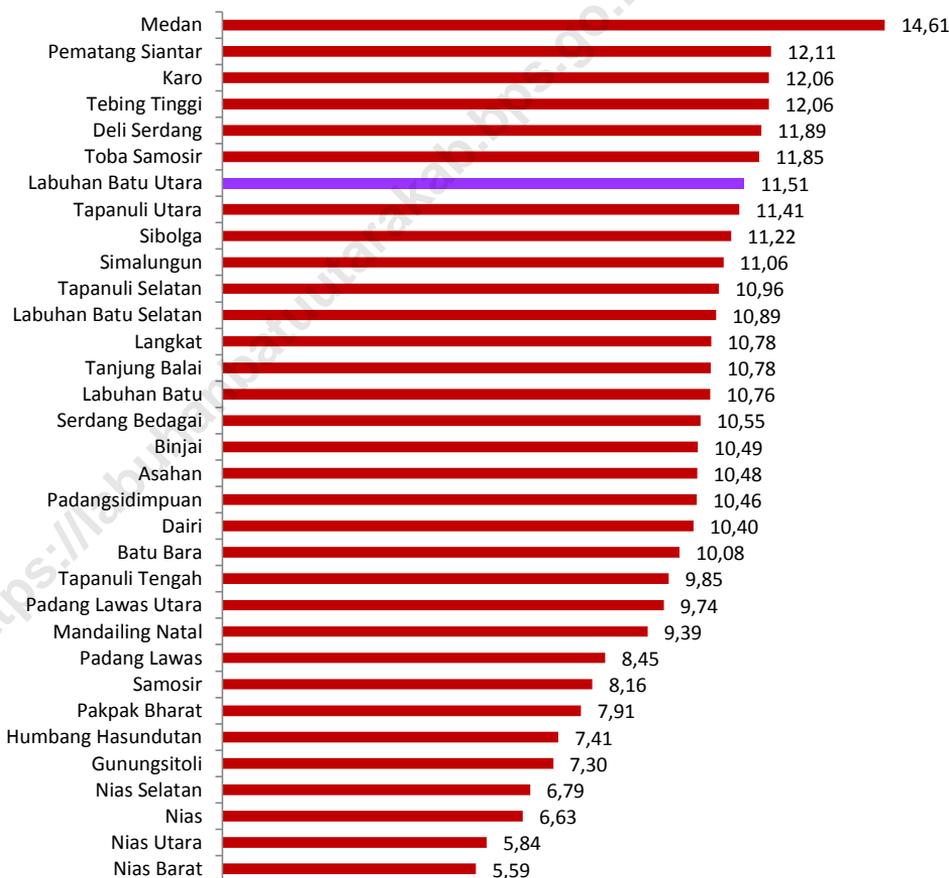
Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, rata-rata lama sekolah Labuhanbatu Utara tahun 2017 menduduki peringkat ke 26 atau peringkat 8 terbawah. RLS ini sangat perlu ditingkatkan dan harus menjadi perhatian pemerintah

daerah. RLS tertinggi di kota Medan mencapai 11,25 tahun, sedangkan RLS terendah di kabupaten Nias yaitu hanya 4,93 tahun.

c. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Labuhanbatu Utara sebesar 11,51 juta rupiah per tahun.

Gambar 3.5 Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

PPP Labuhanbatu Utara berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita provinsi yang hanya sebesar 10,04 juta rupiah. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, pengeluaran per kapita di Labuhanbatu Utara tahun 2017 menduduki

peringkat ke-tujuh teratas. Pengeluaran per kapita tertinggi di Kota Medan mencapai 14,61 juta rupiah per tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Nias Barat yang hanya 5,59 juta rupiah per kapita per tahun.

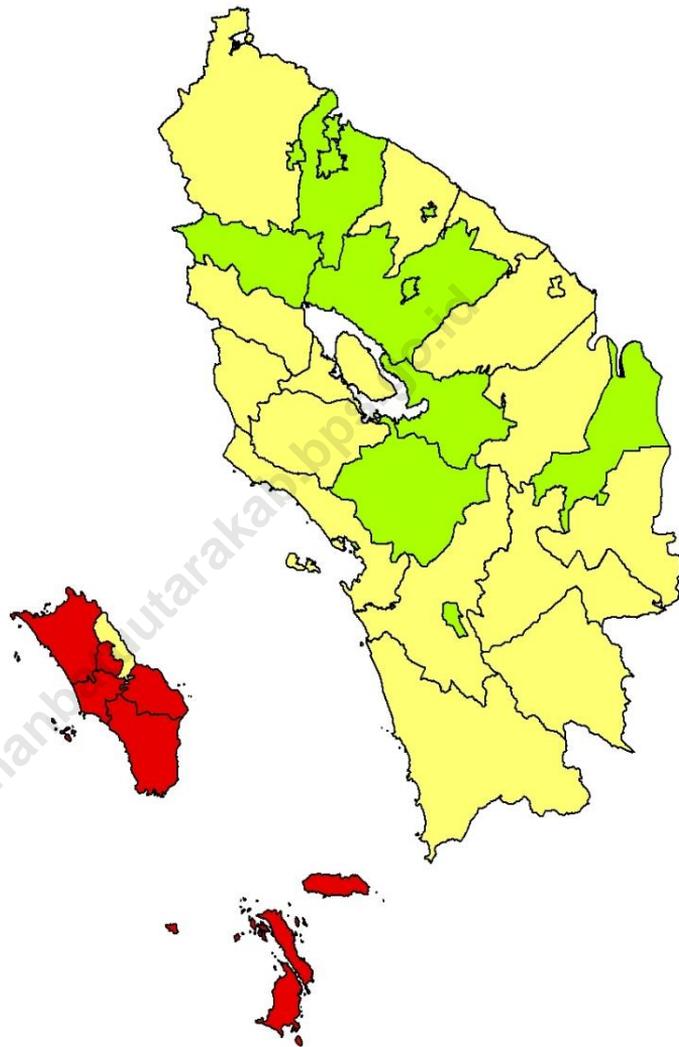
3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Di Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia ibukota provinsi tersebut masuk pada kategori “tinggi”. Sama halnya dengan Labuhanbatu Utara yang juga sudah masuk dalam kategori “tinggi”. Terdapat 16 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “sedang” dan 15 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “tinggi”. Tidak ada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berada pada kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”, namun masih ada 2 kabupaten yang berada pada kategori “rendah” yaitu Nias Selatan dan Nias Barat.

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori status “tinggi” adalah Medan, Pematang Siantar, Binjai, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Toba Samosir, Padangsidempuan, Karo, Tapanuli Utara, Sibolga, Simalungun, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara Labuhanbatu Selatan dan Dairi. Sedangkan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori status “sedang” adalah Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Asahan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, Humbang Hasundutan, Batubara, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Mandailing Natal dan Nias Utara dan Nias.

Terdapat dua kabupaten yang mengalami perubahan status pembangunan manusia pada tahun 2017. Kabupaten Dairi berubah dari status “sedang” ke “tinggi”, sedangkan Kabupaten Nias berubah dari status “rendah” ke “sedang”.

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2017

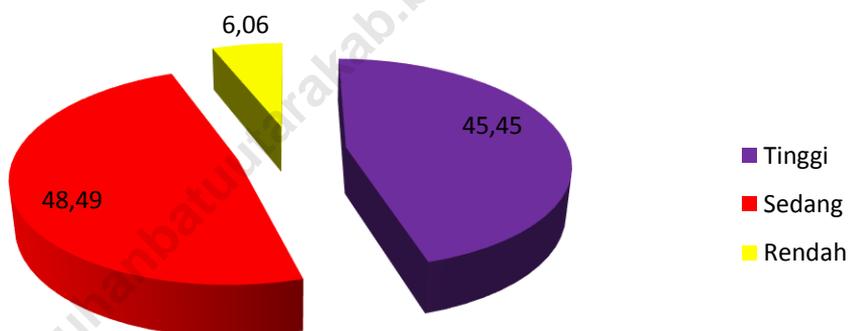


Rendah Sedang Tinggi Sangat

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebanyak 48,49 persen status pembangunan manusia kabupaten/ kota di Sumatera Utara masih berstatus “sedang”. Lebih dari sepertiga (45,45 persen) kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”. Walaupun demikian masih ada kabupaten/kota yang kategori pembangunan manusia rendah yaitu sebesar 6,06 persen. Hingga saat ini, belum ada satu pun kabupaten/kota yang masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”.

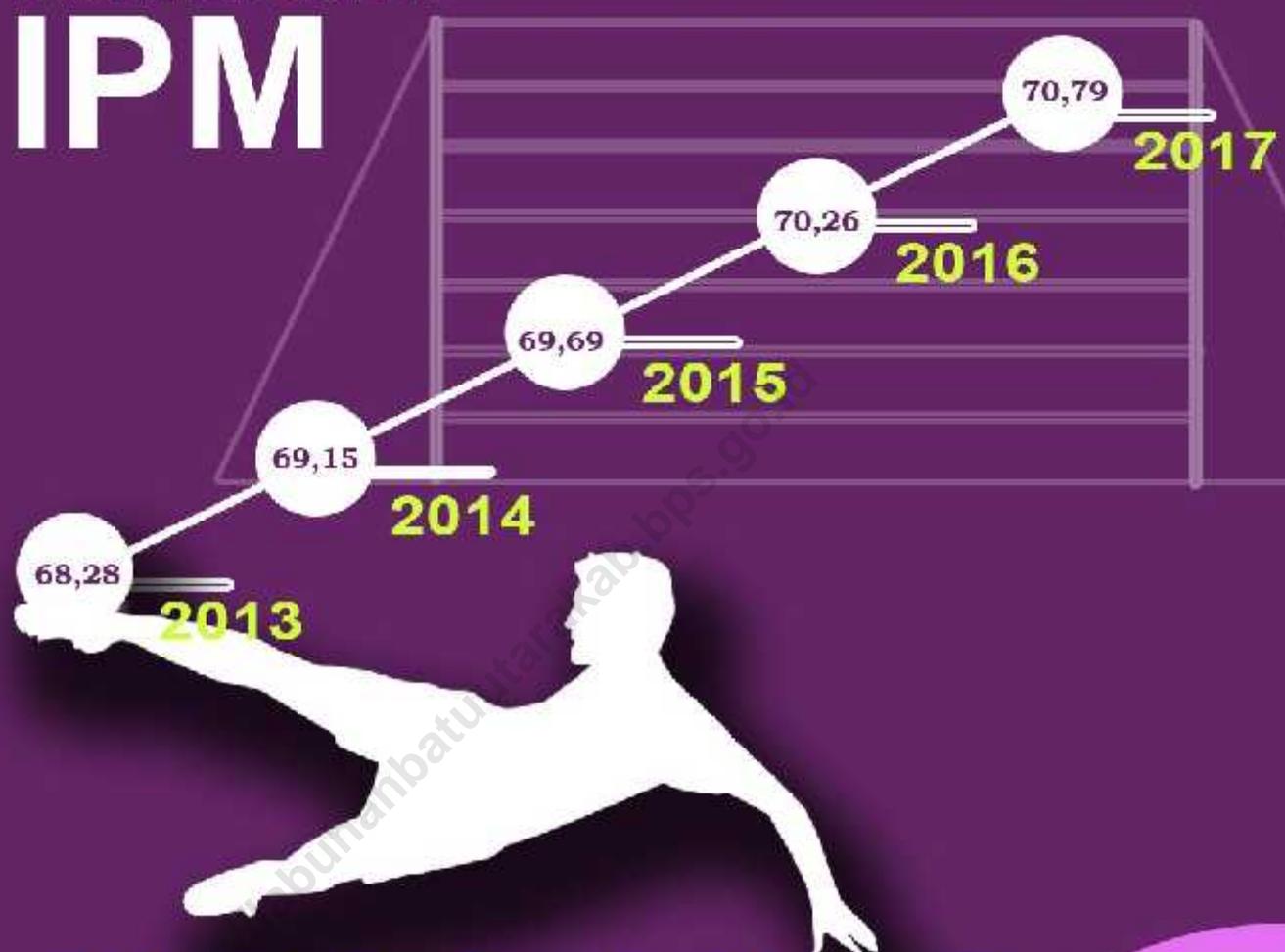
Gambar 3.7 Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2013 s.d 2017

IPM



KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4

Dalam kurun waktu 2013-2015, IPM Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan, namun masih dalam status yang sama yaitu sedang. Setelah tahun 2016, terjadi perubahan status dari sedang menjadi tinggi yang juga dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM.

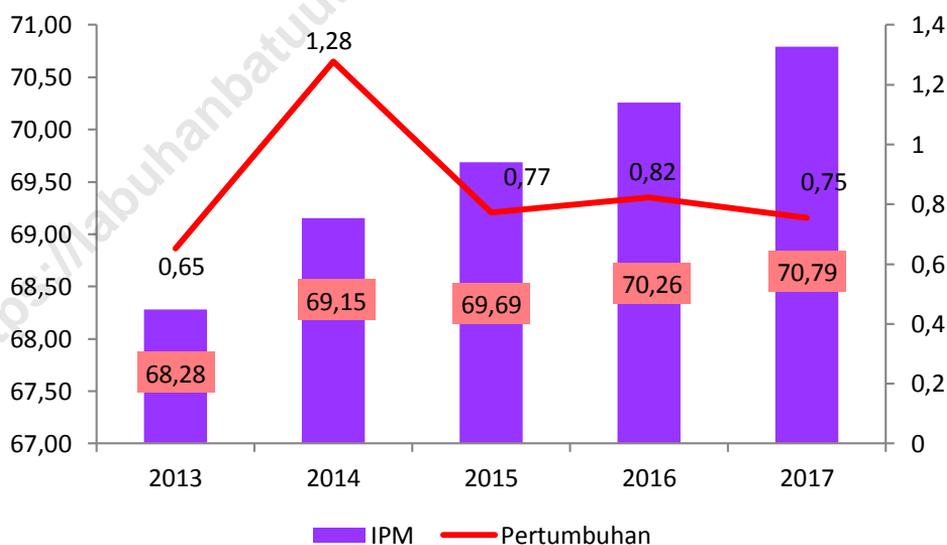
BAB 4

KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Labuhanbatu Utara tahun 2013 sebesar 68,28 terus meningkat menjadi 70,79 pada tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Labuhanbatu Utara terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86 persen per tahun.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Labuhanbatu Utara, 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,28 persen atau naik dari 68,28 pada tahun 2013 menjadi 69,15. Kemudian pertumbuhan ini melambat menjadi 0,77 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 0,82 persen pada tahun 2016 namun kembali melambat pada tahun 2017 menjadi 0,75 persen.

4.2 Lompatan Status Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Labuhanbatu Utara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 IPM Labuhanbatu Utara mengalami percepatan dengan perubahan status dari “sedang” menjadi “tinggi” yaitu dari 69,69 pada tahun 2015 menjadi 70,26 pada tahun 2016.

Tabel 4.1. Perubahan Status Pembangunan Manusia Labuhanbatu Utara, 2013-2017

Tahun	Nilai IPM	Status
(1)	(2)	(3)
2013	68,28	Sedang
2014	69,15	Sedang
2015	69,69	Sedang
2016	70,26	Tinggi
2017	70,79	Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

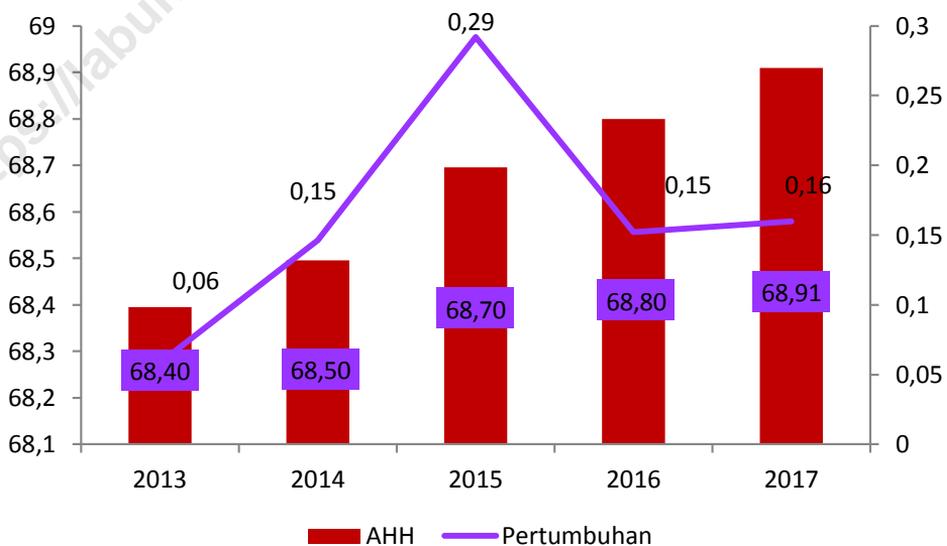
Dalam kurun waktu 2013-2015, IPM Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan, namun masih dalam status yang sama yaitu sedang. Setelah tahun 2016, terjadi perubahan status dari sedang menjadi tinggi yang juga dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM.

4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator AHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Gambar 4.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Labuhanbatu Utara, 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Gambar 4.2 memperlihatkan perkembangan AHH Labuhanbatu Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Labuhanbatu Utara selama periode 2013-2017 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. AHH Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 mencapai 68,91 tahun, berarti setiap bayi di Labuhanbatu Utara yang dilahirkan pada tahun 2017 dapat berharap untuk hidup sampai usia 68,91 tahun.

Selama tahun 2013-2017, angka harapan hidup saat lahir di Labuhanbatu Utara tumbuh rata-rata 0,16 persen per tahun. Pertumbuhan AHH tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,29 persen. Sedangkan pertumbuhan AHH terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 0,06 persen. Peningkatan AHH yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2017 ini didukung dengan meningkatnya layanan fasilitas kesehatan yang juga tidak terlalu signifikan.

Tabel 4.2. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Labuhanbatu Utara, 2016-2017

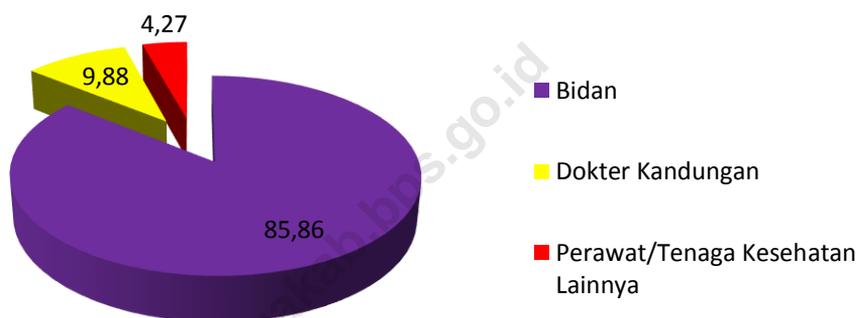
Fasilitas Kesehatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Umum	1	1
Rumah Sakit Swasta	5	5
Puskesmas	18	18
Posyandu	526	526
Klinik/Balai Pengobatan	13	18
Polindes	102	102

Sumber: Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara

Beberapa indikator kesehatan yang juga menunjukkan peningkatan adalah Wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin di Labuhanbatu Utara pada tahun 2016 sebagian besar (58,20 persen) masih melahirkan di rumah, dan pada tahun 2017 jumlah ini menurun menjadi 53,10 persen.

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong saat kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan dan keselamatan ibu dan kesehatan bayi serta pelayanan kesehatan secara umum.

Gambar 4.3 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Labuhanbatu Utara, 2017

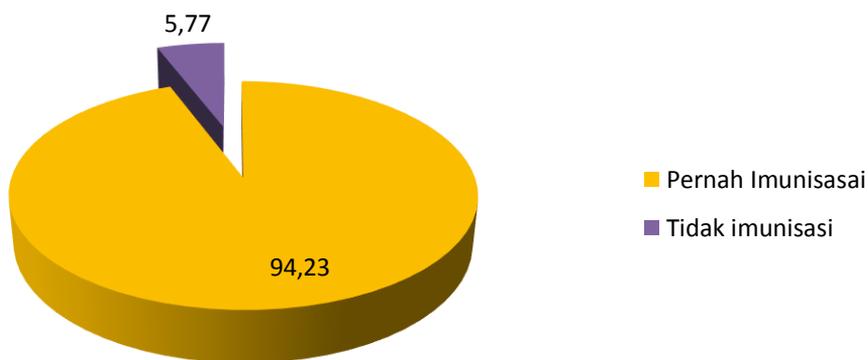


Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada tahun 2017, penolong kelahiran terakhir bayi di Labuhanbatu Utara sudah ditangani oleh tenaga medis yaitu dengan bidan sebesar 85,86 persen, dokter kandungan sebesar 9,88 persen dan perawat/tenaga kesehatan lainnya sebesar 4,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara lebih memilih ditolong oleh tenaga medis (bidan, dokter) daripada tenaga non medis (dukun bayi). Namun, penolong kelahiran anak lahir hidup terakhir oleh dokter kandungan menurun dari 13,41 persen pada tahun 2016 menjadi 9,88 persen pada tahun 2017.

Pemberian imunisasi membantu meningkatkan daya tahan tubuh balita, kesadaran masyarakat akan hal tersebut semakin meningkat. Pada tahun 2016 balita yang pernah imunisasi di Labuhanbatu Utara adalah sebanyak 91,14 persen, meningkat menjadi 94,23 persen pada tahun 2017.

Gambar 4.4 Persentase Balita yang Pernah di Imunisasi di Labuhanbatu Utara,2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Lamanya pemberian ASI juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bayi. Pada tahun 2016 rata-rata pemberian ASI eksklusif di Labuhanbatu Utara adalah 3,94 bulan, turun menjadi 3,68 bulan pada tahun 2017.

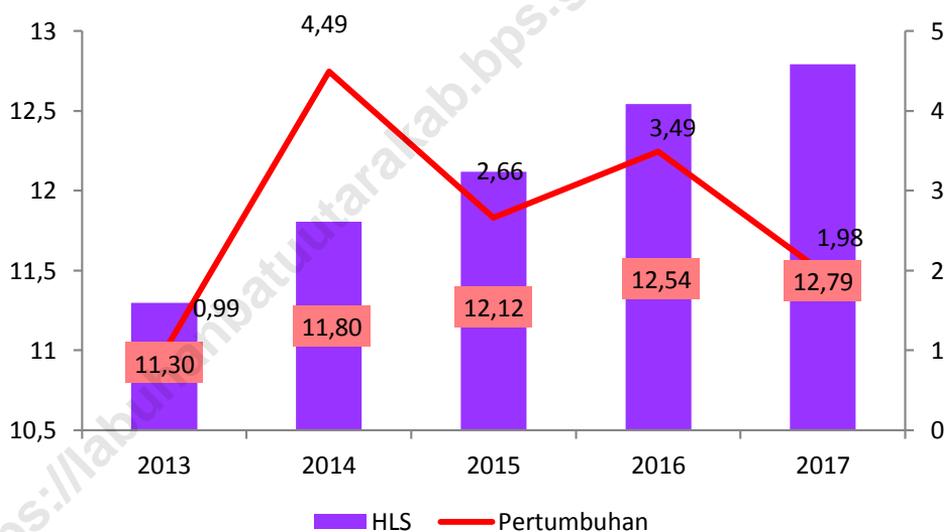
4.4 Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh

pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

Gambar 4.5. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Labuhanbatu Utara, 2013-2017

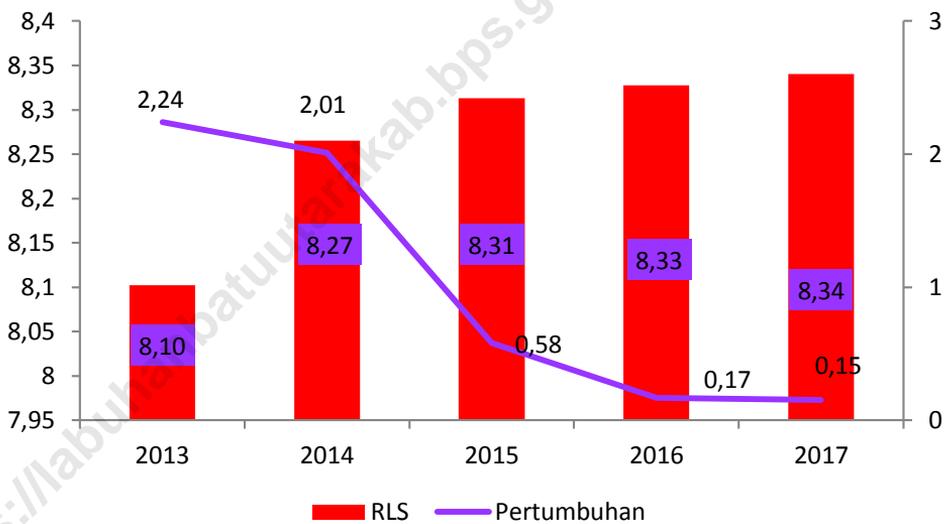


Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada tahun 2013, harapan lama sekolah di Labuhanbatu Utara sebesar 11,30 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 12,79 tahun pada 2017. Hal ini berarti anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,79 tahun atau mencapai Diploma I. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 2,72 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 4,49 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 0,99 persen.

Rata-rata lama sekolah juga meningkat secara konsisten dari tahun 2013 sebesar 8,10 tahun sampai 8,34 tahun pada tahun 2017. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah sampai kelas III SMP. Rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir tumbuh 1,03 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,24 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,15 persen.

Gambar 4.6. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Labuhanbatu Utara, 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Peningkatan komponen pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sejalan dengan meningkatnya fasilitas pendidikan. Terdapat penambahan pada jumlah sekolah dari jenjang SD sampai SMA dan juga penambahan murid pada jenjang yang sama.

Tabel 4.3. Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Labuhanbatu Utara, 2016-2017

Jenjang Pendidikan	Sekolah		Murid	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	319	322	51 826	51 753
SMP	91	94	20 916	20 897
SMA	52	53	15 882	16 330

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kemenag Labuhanbatu Utara

Peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah belum didukung oleh meningkatnya partisipasi sekolah penduduk 10 tahun ke atas. Persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2017 sebanyak 0,55 persen meningkat dari tahun 2016 yang sebanyak 0,03 persen.

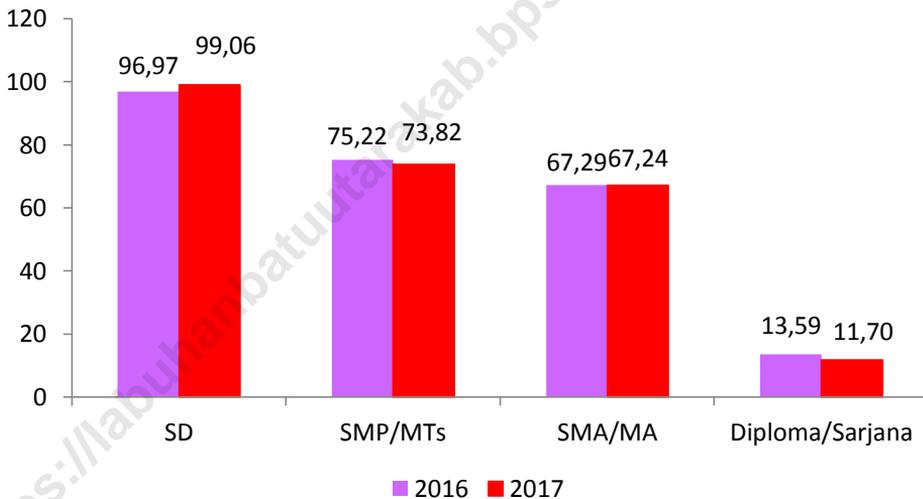
Gambar 4.7. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Partisipasi Sekolah di Labuhanbatu Utara, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya juga meningkat. APM di Labuhanbatu Utara meningkat dari tahun 2016 ke 2017 terutama pada jenjang SD yaitu dari 96,97 persen menjadi 99,06 persen, namun APM jenjang SMP, SMA dan Perguruan tinggi mengalami penurunan.

Gambar 4.8. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Labuhanbatu Utara, 2016-2017



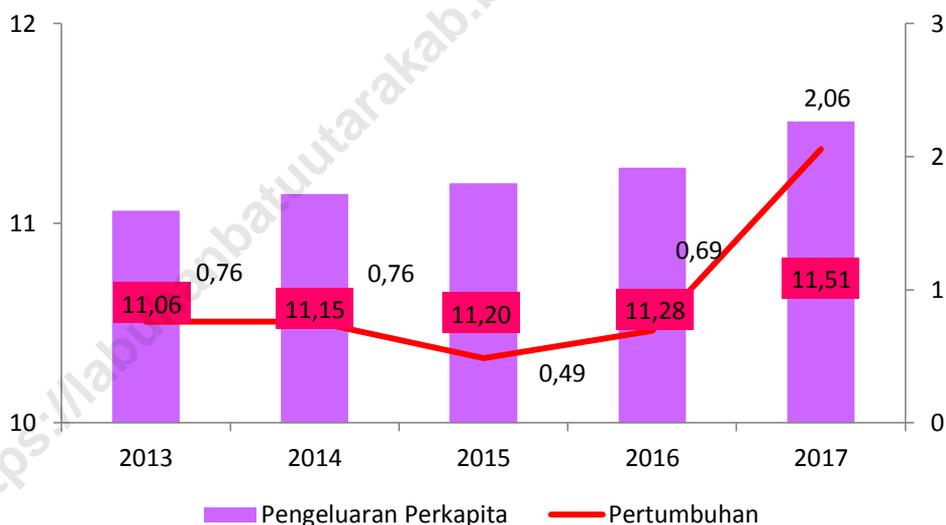
Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

4.5 Kenaikan Standar Hidup

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 4.9. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Labuhanbatu Utara, 2013-2017 (juta rupiah)



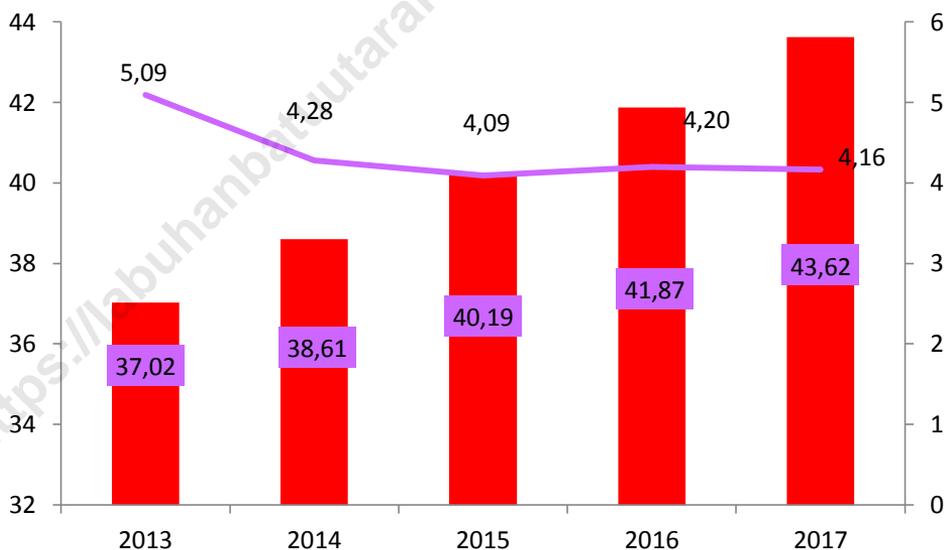
Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada Tahun 2013 pengeluaran perkapita penduduk Labuhanbatu Utara sebesar 11,06 juta rupiah, meningkat menjadi 11,51 juta rupiah pada tahun 2017. Pengeluaran perkapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Labuhanbatu Utara selama periode 2013-2017 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,95

persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 2,06 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,49 persen.

Peningkatan pengeluaran perkapita tahun 2017 sejalan dengan meningkatnya PDRB perkapita atas dasar harga konstan yaitu dari 41,87 juta rupiah tahun 2016 menjadi 43,62 juta rupiah tahun 2017 atau meningkat sebesar 4,16 persen. PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah.

Gambar 4.10. Perkembangan PDRB per Kapita Labuhanbatu Utara, 2013-2017 (juta rupiah)

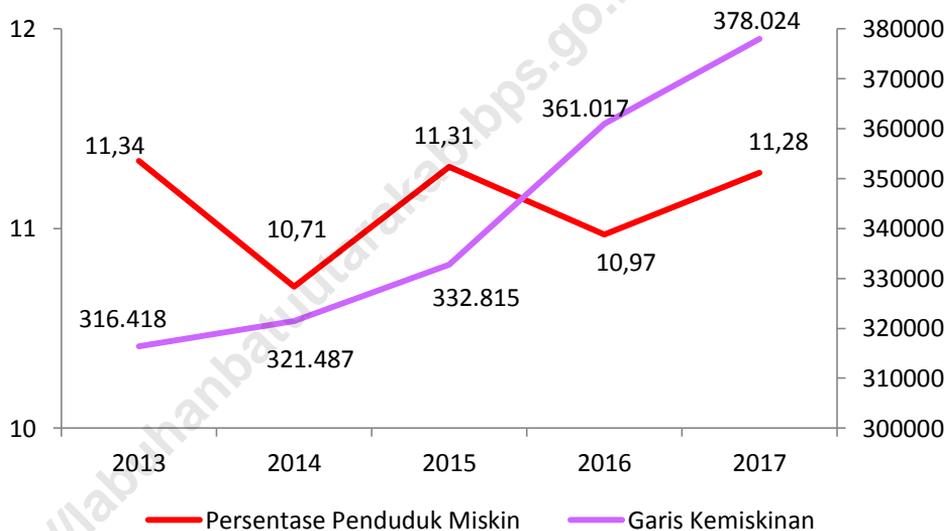


Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Labuhanbatu Utara selama tahun 2013-2017 adalah sebesar 4,34 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015.

Standar hidup yang lebih baik seharusnya sejalan dengan menurunnya persentase jumlah penduduk miskin. Namun, di Labuhanbatu Utara persentase penduduk miskin pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,28 persen dari 10,97 persen pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan dari 361.017 rupiah perkapita perbulan pada tahun 2016 menjadi 378.024 rupiah perkapita perbulan pada tahun 2017.

Gambar 4.11. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Labuhanbatu Utara, 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Perkembangan Selisih HLS dan RLS 2013 - 2017



DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA di Kawasan Pantai Timur

5

Penurunan kesenjangan IPM belum konsisten, sehingga upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil

BAB 5

DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN PANTAI TIMUR

5.1 Gambaran Umum Labuhanbatu Utara

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 1°58' – 2°50' Lintang Utara, 99°25' – 100°05' Bujur Timur dengan ketinggian 0-700 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2017 memiliki 8 kecamatan dan 90 desa/kelurahan definitif dan menempati area seluas 3.545,8 km². Area Kabupaten Labuhanbatu Utara di sebelah utara berbatasan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Padang Lawas Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tobasa, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 5.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Labuhanbatu Utara

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Na IX-X	554,00	15,62
Marbau	355,90	10,04
Aek Kuo	250,20	7,06
Aek Natas	678,00	19,12
Kualuh Selatan	344,51	10,87
Kualuh Hilir	385,48	9,72
Kualuh Hulu	637,39	17,98
KUaluh Leidong	340,32	9,60
Jumlah	3.545,80	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Labuhanbatu Utara, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Aek Natas dengan luas 678 km² atau 19,12 persen dari total luas Labuhanbatu Utara. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Aek Kuo dengan luas 250 km² atau sekitar 7,06 persen dari total luas wilayah Labuhanbatu Utara.

5.2 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur

Kesenjangan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan masalah baru bagi Indonesia khususnya Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Terdapat 12 Kabupaten/kota yang termasuk dalam Kawasan Pantai Timur yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.

Perbandingan pencapaian pembangunan manusia antara Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur sangat menarik untuk di bahas, mengingat kontribusi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang mencapai 57,61 persen dari keseluruhan Produk

Domestik Regional Bruto (PRDB) Kawasan Pantai Timur pada tahun 2017. Ketimpangan tersebut tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusianya.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, kesenjangan pembangunan manusia juga terjadi antara kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur. Secara umum pembangunan manusia di wilayah kabupaten lebih tertinggal dibandingkan wilayah kota.

Gambar 5.1 IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tahun 2017, IPM kabupaten/kota tertinggi di kawasan Pantai Timur adalah Kota Medan yaitu sebesar 79,98 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Batubara yang hanya sebesar 67,20. Pencapaian IPM Kota Medan yang tinggi sangat wajar karena daerah tersebut merupakan ibukota Provinsi yang menjadi pusat pembangunan. Rata-rata IPM pada Kawasan Pantai Timur adalah 71,45. Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada urutan ke-6 dengan nilai IPM yang berada di bawah rata-rata Kawasan.

Capaian pembangunan manusia di kawasan Pantai Timur berada pada status tinggi dan sedang. Tahun 2017, sebanyak 58,33 persen kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur telah berada pada status pembangunan manusia “tinggi” dan 41,67 persen kabupaten/kota lainnya berada pada status pembangunan manusia “sedang”.

Tabel 5.2 Status IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur, 2017

Kabupaten/Kota	IPM	Status
(1)	(2)	(3)
Labuhanbatu	71,00	Tinggi
Asahan	69,10	Sedang
Deli Serdang	73,94	Tinggi
Langkat	69,82	Sedang
Serdang Bedagai	69,16	Sedang
Batubara	67,20	Sedang
Labuhanbatu Selatan	70,48	Tinggi
Labuhanbatu Utara	70,79	Tinggi
Tanjung Balai	67,41	Sedang
Tebing Tinggi	73,90	Tinggi
Medan	79,98	Tinggi
Binjai	74,65	Tinggi

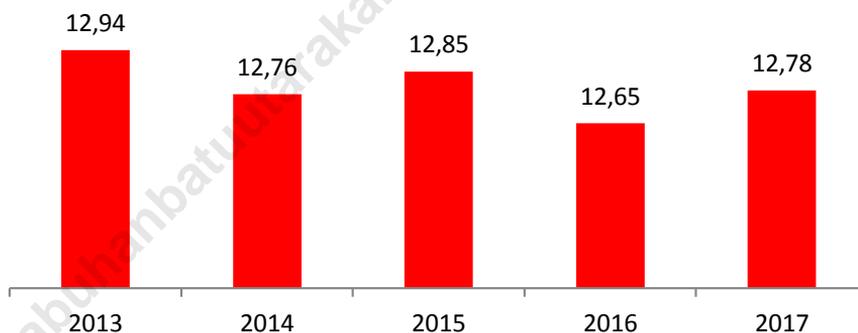
Pencapaian pembangunan manusia di Kawasan Pantai Timur cukup bagus karena tidak ada kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang masih “rendah”. Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada status “tinggi” seperti Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdapat satu kota yang berada pada pembangunan manusia berstatus “sedang” yaitu Kota Tanjung Balai.

Disparitas yang cukup tinggi tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kawasan Pantai Timur adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Sumatera Utara yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

5.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia di Kawasan Pantai Timur

Selama kurun waktu lima tahun, kesenjangan pembangunan manusia di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara mengalami penurunan. Selama tahun 2013-2017, terjadi penurunan kesenjangan antara angka IPM tertinggi dan terendah. Tahun 2013 selisih IPM kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur tertinggi (Medan) dengan terendah (Batubara) sebesar 12,94 turun menjadi 12,78 pada tahun 2017. Rentang IPM cenderung menyempit.

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Penurunan kesenjangan IPM belum konsisten, sehingga upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil. Bagai sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

a. Kesenjangan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang semakin membaik, kesenjangan kesehatan antar kabupaten/kota pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara AHH tertinggi dengan AHH terendah. Tahun 2013 selisih AHH kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 10,83 turun menjadi 10,12 pada tahun 2017. Rentang kesenjangan AHH cenderung menyempit.

Gambar 5.3 Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten/kota dengan AHH terendah yaitu Kota Tanjung Balai, sedangkan AHH tertinggi dicapai Kota Medan. Penurunan kesenjangan AHH antar kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara cukup baik, namun kesenjangan sebesar 10,12 pada tahun 2017 tergolong masih tinggi. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan agar kesenjangan kesehatan semakin kecil.

b. Kesenjangan Pendidikan

Seiring dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2013-2017, pendidikan di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan yang baik. Di semua kabupaten/kota pada Kawasan Pantai Timur, Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun

semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

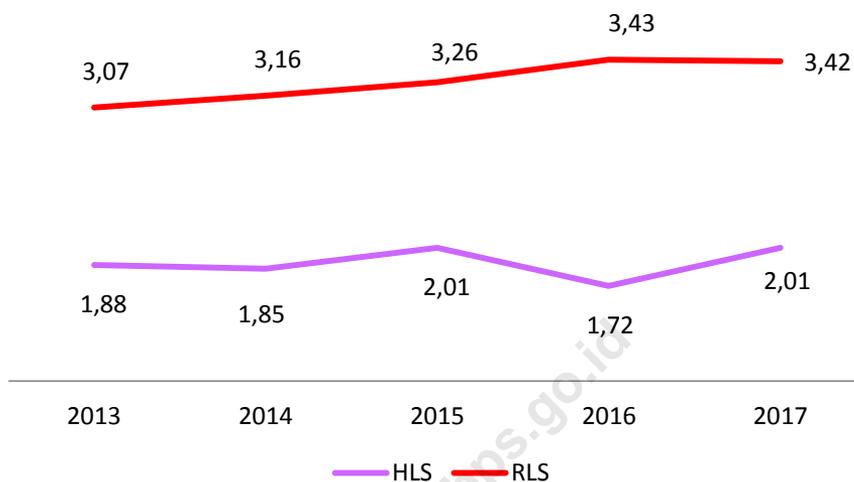
Kesenjangan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur cenderung fluktuatif. Walaupun sedikit menurun pada tahun 2014 dan 2016, namun selisihnya juga naik pada tahun 2015 dan 2017. Tahun 2013 selisih HLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 1,88 meningkat menjadi 2,01 pada tahun 2017.

HLS tertinggi selama tahun 2013-2017 adalah kota Medan, sedangkan HLS terendah pada tahun 2013-2014 adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan berubah menjadi Kabupaten Batubara pada tahun 2015-2017. Pada tahun 2017, rata-rata penduduk usia 7 di Kota Medan berpotensi menempuh pendidikan selama 14,45 tahun. sementara di Kabupaten Batubara hanya berpotensi menempuh pendidikan selama 12,49 tahun. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah semakin merata, namun tetap perlu ditingkatkan.

Pola yang sedikit berbeda terjadi pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selama lima tahun terakhir, kesenjangan RLS tertinggi dengan terendah yang terjadi di Kawasan Pantai Timur tidak stabil bahkan cenderung meningkat. Tahun 2013 selisih RLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 3,07 naik menjadi 3,42 pada tahun 2017. Penurunan selisih RLS hanya terjadi pada tahun 2017

Kesenjangan rata-rata lama sekolah di Kawasan Pantai Timur terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Medan dengan Kabupaten Batubara. Di tahun 2017, rata-rata penduduk Kota Medan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,25 tahun. sementara di Kabupaten Batubara hanya menempuh pendidikan selama 7,83 tahun. Oleh karena itu, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus digalakkan agar kesenjangan semakin kecil.

Gambar 5.4 Perkembangan Selisih HLS dan RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur, 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

c. Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita. Selama kurun waktu 2013 hingga 2017, angka pengeluaran per kapita Kawasan Pantai Timur terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan kesenjangan antarwilayah.

Kesenjangan pengeluaran per kapita cenderung fluktuatif. Tahun 2013 selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi yaitu Kota Medan dengan terendah yaitu Kabupaten Batubara sebesar 4,68 juta. Sedangkan pada tahun 2017 selisih pengeluaran per kapita turun menjadi 4,53 juta. Kenaikan kesenjangan pengeluaran perkapita terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan penurunan kesenjangan terjadi pada tahun 2014 dan 2015.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Pantai Timur (juta rupiah), 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

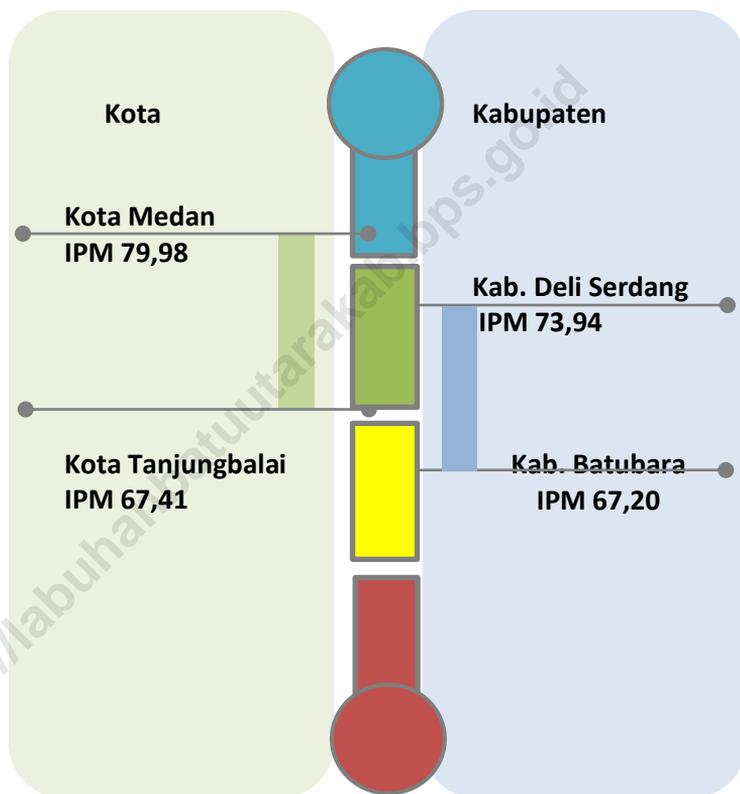
5.4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antara Kabupaten dan Kota

Hal yang lebih menarik jika membandingkan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota jauh lebih maju dibanding kabupaten.

Kawasan Pantai Timur terdiri dari 12 kabupaten/kota yaitu 4 wilayah kota dan 8 wilayah kabupaten. Capaian pembangunan manusia di kota memang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten. Tahun 2017, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kota adalah Kota Medan dengan capaian sebesar 79,98. Sementara itu, capaian pembangunan manusia paling tinggi untuk wilayah kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang sebesar 73,94.

Pada tahun yang sama, capaian pembangunan manusia untuk wilayah kota yang paling rendah yaitu Kota Tanjungbalai dengan IPM sebesar 67,41. Sementara itu untuk wilayah kabupaten, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Batubara dengan IPM hanya sebesar 67,20.

Gambar 5.6 IPM Kawasan Pantai Timur Menurut Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, 2017



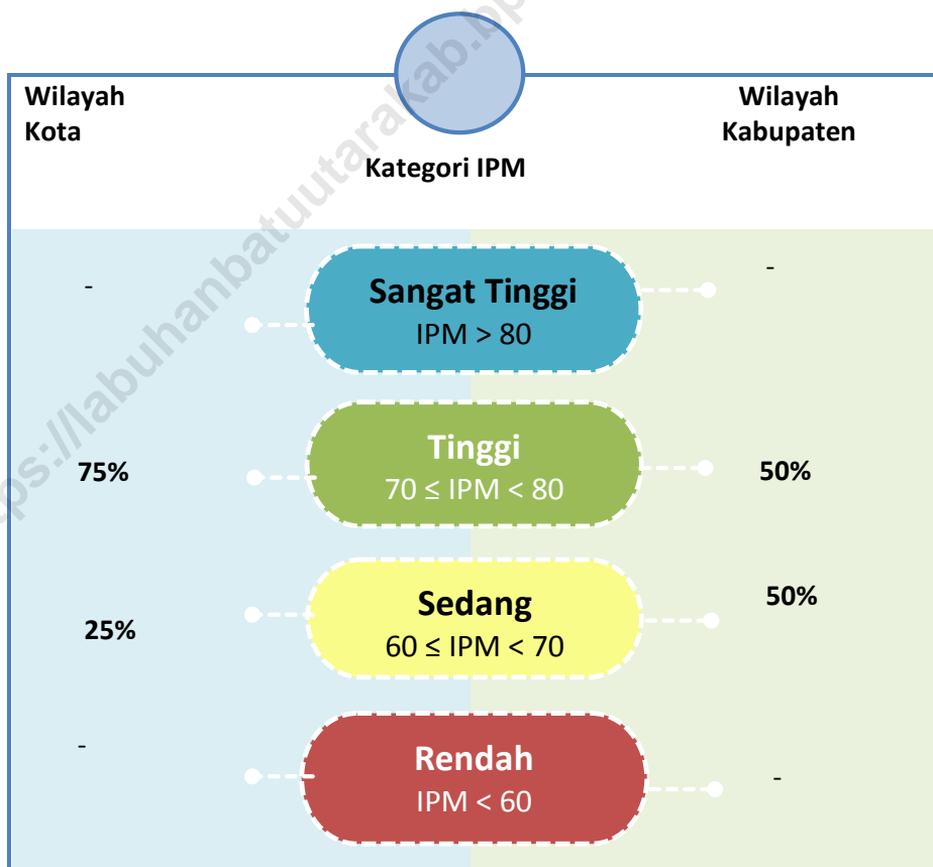
Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kesenjangan pembangunan manusia antara kota dengan kabupaten cukup signifikan di Kawasan Pantai Timur. Tahun 2017, IPM Kota Medan dengan Kota Tanjungbalai berjarak 12,57. Sedangkan di wilayah kabupaten, jarak IPM antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Batubara sebesar 6,74. Artinya,

kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kabupaten lebih baik dibanding yang terjadi di wilayah kota.

Dilihat dari status pembangunan manusia, perbedaan kemajuan antara kota dengan kabupaten di Kawasan Pantai Timur cukup terlihat. Tahun 2017, dari empat wilayah kota, yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” telah mencapai 75 persen. Sementara di wilayah kabupaten, dari delapan Kabupaten ada empat kabupaten atau 50 persen yang berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Gambar 5.7. Perbandingan IPM kabupaten/Kota di Kawasan Pantai Timur Menurut Status IPM, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara

Di wilayah kabupaten, status pembangunan manusia “sedang” sama banyaknya dengan status “tinggi”, yaitu sebanyak 50 persen. Sementara di wilayah Kota, hanya 25 persen yang masih berstatus “sedang”.

Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan tingkat kesenjangan yang terjadi di kota dan kabupaten mengalami dinamika. Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di kota cenderung turun. Jarak antara IPM tertinggi dan terendah di kota turun dari 12,60 pada tahun 2013 menjadi 12,57 pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi di kabupaten dengan kesenjangan pembangunan manusia yang justru cenderung naik. Tahun 2013, kesenjangan antara IPM tertinggi dan terendah di kabupaten berjarak 6,33, namun pada tahun 2016 jaraknya melebar menjadi 6,74.

Fenomena kesenjangan di kota dan kabupaten juga terjadi pada semua dimensi pembangunan manusia, baik kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup yang layak. Fenomena yang cukup menarik ternyata kesenjangan yang terjadi di kota lebih besar jika dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten. Hal ini terjadi pada semua dimensi pembentuk IPM.

Kesenjangan AHH yang terjadi di kota cukup berbeda dibandingkan kesenjangan AHH di kabupaten. Tahun 2017, jarak antara angka harapan hidup tertinggi dan terendah di kota sebesar 10,12 tahun. Sementara jarak di kabupaten hanya 5,01 tahun. Namun perbaikan kesenjangan AHH di kota cenderung lebih cepat dibanding dengan kabupaten.

Dimensi berikutnya yang cukup penting adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kesenjangan harapan lama sekolah yang terjadi di kota juga cukup berbeda dibandingkan kesenjangan HLS di kabupaten. Tahun 2017, jarak antara harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di kota 2,01 tahun sementara di kabupaten hanya 0,41 tahun.

Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di kota tidak berbeda jauh dibandingkan kesenjangan di kabupaten. Tahun 2017, perbedaan antara rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di kota 1,16 tahun. Sementara perbedaan di kabupaten selama 1,87 tahun. Tercatat bahwa selama tahun 2012 hingga 2016, kesenjangan rata-rata lama sekolah di kabupaten dan kota sama-sama cenderung meningkat, namun pada tahun 2017 kesenjangan tersebut mengalami penurunan.

Dimensi selanjutnya adalah pengeluaran per kapita disesuaikan. Kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan yang terjadi di kabupaten. Perkembangan kesenjangan di kota selama lima tahun terakhir cenderung memburuk. Sedangkan perkembangan di kabupaten justru berfluktuasi. Dengan demikian, dimensi ini juga perlu mendapat perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan manusianya tidak semakin melebar.

<https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,18	12,12	4,93	6 629	60,21
Mandailing Natal	61,97	12,99	8,00	9 385	65,13
Tapanuli Selatan	64,28	13,08	8,67	10 955	68,69
Tapanuli Tengah	66,66	12,65	8,28	9 852	67,96
Tapanuli Utara	67,86	13,65	9,46	11 407	72,38
Toba Samosir	69,36	13,25	10,10	11 846	73,87
Labuhan Batu	69,44	12,59	9,01	10 760	71,00
Asahan	67,57	12,53	8,46	10 477	69,10
Simalungun	70,53	12,71	8,95	11 055	71,83
Dairi	68,13	13,06	8,90	10 395	70,36
Karo	70,77	12,71	9,54	12 059	73,53
Deli Serdang	71,11	12,90	9,70	11 891	73,94
Langkat	67,94	12,72	8,51	10 784	69,82
Nias Selatan	68,00	11,98	4,95	6 792	59,85
Humbahas	68,41	13,24	9,10	7 412	67,30
Pakpak Bharat	65,05	13,82	8,47	7 913	66,25
Samosir	70,68	13,43	8,95	8 163	69,43
Serdang Bedagai	67,79	12,55	8,35	10 551	69,16
Batu Bara	66,10	12,49	7,83	10 084	67,20
Paluta	66,58	12,41	8,93	9 737	68,34
Padang Lawas	66,50	12,99	8,43	8 445	66,82
Labuhanbatu Selatan	68,14	12,95	8,70	10 892	70,48
Labuhanbatu Utara	68,91	12,79	8,34	11 510	70,79
Nias Utara	68,77	12,57	6,08	5 835	60,57
Nias Barat	68,28	12,61	5,78	5 594	59,56
Kota Sibolga	68,05	13,12	9,87	11 221	72,28
Kota Tanjung Balai	62,28	12,44	9,14	10 778	67,41
Kota P. Siantar	72,63	14,01	11,06	12 106	77,54
Kota Tebing Tinggi	70,28	12,66	10,09	12 055	73,90
Kota Medan	72,40	14,45	11,25	14 613	79,98
Kota Binjai	71,75	13,58	10,58	10 487	74,65
Kota P. Sidempuan	68,41	14,50	10,56	10 464	73,81
Kota Gunung Sitoli	70,42	13,69	8,40	7 300	67,68
SUMATERA UTARA	68,37	13,10	9,25	10 036	70,57

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2016

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,07	12,09	4,92	6 409	59,75
Mandailing Natal	61,77	12,78	7,89	9 237	64,55
Tapanuli Selatan	64,01	13,07	8,35	10 821	68,04
Tapanuli Tengah	66,62	12,45	8,03	9 694	67,27
Tapanuli Utara	67,71	13,61	9,32	11 242	71,96
Toba Samosir	69,25	13,19	10,09	11 687	73,61
Labuhan Batu	69,40	12,58	8,78	10 559	70,50
Asahan	67,47	12,52	8,33	10 288	68,71
Simalungun	70,43	12,70	8,86	10 855	71,48
Dairi	67,95	12,84	8,70	10 190	69,61
Karo	70,69	12,65	9,51	11 925	73,29
Deli Serdang	71,06	12,69	9,68	11 683	73,51
Langkat	67,79	12,71	8,18	10 567	69,13
Nias Selatan	67,83	11,97	4,65	6 647	59,14
Humbahas	68,26	13,21	8,91	7 135	66,56
Pakpak Bharat	64,95	13,81	8,46	7 641	65,81
Samosir	70,47	13,42	8,94	7 813	68,82
Serdang Bedagai	67,63	12,54	8,34	10 246	68,77
Batu Bara	66,95	12,34	7,75	9 886	66,69
Paluta	66,54	12,30	8,92	9 600	68,05
Padang Lawas	66,40	12,92	8,41	8 094	66,23
Labuhanbatu Selatan	68,11	12,94	8,69	10 712	70,28
Labuhanbatu Utara	68,80	12,54	8,33	11 278	70,26
Nias Utara	68,68	12,41	6,07	5 770	60,23
Nias Barat	68,10	12,60	5,77	5 391	59,03
Kota Sibolga	67,87	13,11	9,86	11 034	72,00
Kota Tanjung Balai	62,09	12,41	9,13	10 577	67,09
Kota P. Siantar	72,46	14,00	10,75	11 878	76,90
Kota Tebing Tinggi	70,21	12,65	10,07	11 747	73,58
Kota Medan	72,34	14,06	11,18	14 393	79,34
Kota Binjai	71,67	13,57	10,28	10 342	74,11
Kota P. Sidempuan	68,37	14,49	10,48	10 198	73,42
Kota Gunung Sitoli	70,36	13,66	8,20	6 963	66,85
SUMATERA UTARA	68,33	13,00	9,12	9 744	70,00

Lampiran 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2015

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	68,97	11,77	4,76	6 234	58,85
Mandailing Natal	61,58	12,77	7,63	9 096	63,99
Tapanuli Selatan	63,74	13,06	8,27	10 623	67,63
Tapanuli Tengah	66,59	12,40	8,02	9 555	67,06
Tapanuli Utara	67,55	13,19	9,31	11 079	71,32
Toba Samosir	69,14	13,18	10,08	11 535	73,40
Labuhan Batu	69,36	12,57	8,75	10 356	70,23
Asahan	67,37	12,49	8,32	10 067	68,40
Simalungun	70,34	12,69	8,80	10 728	71,24
Dairi	67,78	12,80	8,69	9 708	69,00
Karo	70,62	12,22	9,50	11 800	72,69
Deli Serdang	71,00	12,52	9,48	11 359	72,79
Langkat	67,63	12,70	7,92	10 364	68,53
Nias Selatan	67,66	11,96	4,64	6 454	58,74
Humbahas	68,10	13,15	8,90	6 889	66,03
Pakpak Bharat	64,85	13,80	8,45	7 496	65,53
Samosir	70,26	13,41	8,84	7 698	68,43
Serdang Bedagai	67,47	12,31	8,08	10 110	68,01
Batu Bara	65,80	11,96	7,74	9 692	66,02
Paluta	66,50	11,87	8,91	9 363	67,35
Padang Lawas	66,31	12,91	8,40	7 955	65,99
Labuhanbatu Selatan	68,09	12,73	8,68	10 319	69,67
Labuhanbatu Utara	68,70	12,12	8,31	11 201	69,69
Nias Utara	68,59	12,40	6,06	5 627	59,88
Nias Barat	67,94	12,33	5,74	5 207	58,25
Kota Sibolga	67,70	13,10	9,85	10 765	71,64
Kota Tanjung Balai	61,90	12,40	9,12	10 326	66,74
Kota P. Siantar	72,29	13,99	10,73	11 388	76,34
Kota Tebing Tinggi	70,14	12,23	10,06	11 393	72,81
Kota Medan	72,28	13,97	11,00	14 191	78,87
Kota Binjai	71,59	13,56	10,28	10 098	73,81
Kota P. Sidempuan	68,32	14,48	10,47	9 668	72,80
Kota Gunung Sitoli	70,29	13,65	8,18	6 742	66,41
SUMATERA UTARA	68,29	12,82	9,03	9 563	69,51

Lampiran 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2014

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	68,87	11,45	4,75	5 980	57,98
Mandailing Natal	61,18	12,57	7,54	9 040	63,42
Tapanuli Selatan	63,14	13,04	8,22	10 593	67,22
Tapanuli Tengah	66,49	12,21	7,55	9 489	66,16
Tapanuli Utara	67,25	13,14	9,05	10 964	70,70
Toba Samosir	69,04	13,16	9,83	11 250	72,79
Labuhan Batu	69,26	12,56	8,68	10 325	70,06
Asahan	67,27	12,15	7,98	9 988	67,51
Simalungun	70,24	12,63	8,70	10 597	70,89
Dairi	67,48	12,05	8,59	9 642	67,91
Karo	70,42	11,89	9,33	11 548	71,84
Deli Serdang	70,80	12,11	9,46	11 065	71,98
Langkat	67,33	12,69	7,85	10 062	68,00
Nias Selatan	67,16	11,48	4,64	6 329	57,78
Humbahas	67,80	13,13	8,88	6 736	65,59
Pakpak Bharat	64,45	13,78	8,39	7 364	65,06
Samosir	69,66	13,39	8,57	7 667	67,80
Serdang Bedagai	67,27	12,29	8,04	10 042	67,78
Batu Bara	65,50	11,94	7,72	9 370	65,50
Paluta	66,40	11,84	8,44	9 171	66,50
Padang Lawas	66,01	12,90	8,16	7 910	65,50
Labuhanbatu Selatan	68,06	11,88	8,67	10 111	68,59
Labuhanbatu Utara	68,50	11,80	8,27	11 147	69,15
Nias Utara	68,49	11,86	6,05	5 580	59,18
Nias Barat	67,64	11,87	5,73	5 156	57,54
Kota Sibolga	67,40	12,76	9,83	10 623	71,01
Kota Tanjung Balai	61,40	12,25	9,03	10 133	66,05
Kota P. Siantar	71,69	13,97	10,70	11 204	75,83
Kota Tebing Tinggi	70,04	12,04	10,05	10 918	72,13
Kota Medan	72,18	13,69	10,88	13 984	78,26
Kota Binjai	71,39	13,00	9,77	10 058	72,55
Kota P. Sidempuan	68,27	13,95	10,13	9 623	71,88
Kota Gunung Sitoli	70,19	13,28	8,17	6 685	65,91
SUMATERA UTARA	68,04	12,61	8,93	9 391	68,87

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2013

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	68,77	11,15	4,71	5 914	57,43
Mandailing Natal	61,08	12,21	7,52	8 960	62,91
Tapanuli Selatan	63,04	12,93	8,04	10 504	66,75
Tapanuli Tengah	66,47	11,89	7,50	9 382	65,64
Tapanuli Utara	67,15	13,09	9,04	10 850	70,50
Toba Samosir	68,94	12,89	9,79	11 178	72,36
Labuhan Batu	69,24	12,17	8,60	10 210	69,45
Asahan	67,17	11,51	7,89	9 895	66,58
Simalungun	70,14	12,57	8,37	10 494	70,28
Dairi	67,38	11,43	8,58	9 580	67,15
Karo	70,38	11,87	9,25	11 453	71,62
Deli Serdang	70,78	11,77	9,37	10 924	71,39
Langkat	67,23	12,21	7,69	9 970	67,17
Nias Selatan	67,06	11,17	4,28	6 266	56,78
Humbahas	67,70	12,67	8,80	6 670	64,92
Pakpak Bharat	64,42	13,76	8,25	7 269	64,73
Samosir	69,56	12,57	8,52	7 600	66,80
Serdang Bedagai	67,17	11,87	8,02	9 882	67,11
Batu Bara	65,40	11,74	7,70	9 218	65,06
Paluta	66,38	11,62	8,41	9 076	66,13
Padang Lawas	65,97	12,16	8,14	7 825	64,62
Labuhanbatu Selatan	68,03	11,69	8,25	10 040	67,78
Labuhanbatu Utara	68,40	11,30	8,10	11 063	68,28
Nias Utara	68,39	11,76	5,55	5 523	58,29
Nias Barat	67,54	11,77	5,25	5 061	56,58
Kota Sibolga	67,30	12,45	9,73	10 525	70,45
Kota Tanjung Balai	61,30	11,91	8,90	10 001	65,40
Kota P. Siantar	71,59	13,36	10,62	11 139	75,05
Kota Tebing Tinggi	69,94	11,90	10,04	10 829	71,85
Kota Medan	72,13	13,65	10,76	13 902	78,00
Kota Binjai	71,34	12,63	9,75	9 943	72,02
Kota P. Sidempuan	68,22	13,93	10,10	9 518	71,68
Kota Gunung Sitoli	70,13	12,92	8,16	6 524	65,25
SUMATERA UTARA	67,94	12,41	8,79	9 309	68,36

Lampiran 6. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2017

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir						Jumlah
	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun beranak/paraji	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)
Nias	2,63	5,36	44,42	28,34	17,83	1,42	100
Madina	8,66	0,59	75,01	15,59	0,16	0,00	100
Tapanuli Selatan	12,58	0,00	83,37	4,05	0,00	0,00	100
Tapanuli Tengah	7,73	0,32	86,22	4,30	0,00	1,42	100
Tapanuli Utara	25,34	2,20	61,23	10,28	0,95	0,00	100
Toba Samosir	38,67	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	100
Labuhan Batu	17,77	0,00	77,84	4,39	0,00	0,00	100
Asahan	32,32	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	100
Simalungun	24,69	3,03	68,07	4,21	0,00	0,00	100
Dairi	22,89	0,41	71,53	5,17	0,00	0,00	100
Karo	20,93	2,41	75,45	1,21	0,00	0,00	100
Deli Serdang	28,63	5,81	65,56	0,00	0,00	0,00	100
Langkat	34,45	1,59	63,69	0,28	0,00	0,00	100
Nias Selatan	5,61	4,45	50,55	34,11	0,00	5,27	100
Humbahas	14,87	0,00	77,92	7,10	0,11	0,00	100
Pakpak Barat	27,72	2,82	47,02	22,44	0,00	0,00	100
Samosir	34,15	0,00	62,58	2,46	0,81	0,00	100
Serdang Bedagai	27,15	0,76	71,11	0,98	0,00	0,00	100
Batu Bara	10,91	1,48	86,72	0,89	0,00	0,00	100
Paluta	5,89	0,00	71,13	18,96	4,02	0,00	100
Padang Lawas	10,26	2,09	61,17	23,55	2,92	0,00	100
Labusel	14,11	2,49	78,93	4,47	0,00	0,00	100
Labura	9,88	0,00	85,86	4,27	0,00	0,00	100
Nias Utara	10,01	0,00	58,46	25,06	2,94	3,52	100
Nias Barat	3,98	0,00	70,79	19,40	3,87	1,96	100
Kota Sibolga	23,76	0,92	72,73	1,79	0,80	0,00	100
Tanjung Balai	20,01	1,74	78,25	0,00	0,00	0,00	100
P. Siantar	27,57	0,00	72,43	0,00	0,00	0,00	100
Tebing Tinggi	34,58	0,00	60,65	0,00	4,76	0,00	100
Medan	33,89	2,25	56,53	4,90	1,47	0,96	100
Binjai	38,16	0,00	61,42	0,42	0,00	0,00	100
P. Sidempuan	18,06	1,42	80,52	0,00	0,00	0,00	100
Gunung Sitoli	47,60	3,22	47,22	1,96	0,00	0,00	100
SUMUT	24,18	2,03	68,10	4,74	0,63	0,31	100

Lampiran 7. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2016

Kabupaten/Kota	Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir								
	Dokter Kandung an	Dokter UMum	Bidan	Perawat	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun beranak /paraji	Lainnya	Tidak ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nias	1,70	3,37	36,99	0,00	1,43	39,87	16,65	0,00	100
Madina	15,65	2,00	69,20	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	100
Tapanuli Selatan	2,07	0,00	72,12	0,00	0,00	20,55	5,26	0,00	100
Tapanuli Tengah	6,28	0,00	78,19	0,00	1,47	10,01	4,05	0,00	100
Tapanuli Utara	22,37	3,14	56,43	0,00	1,76	16,29	0,00	0,00	100
Toba Samosir	35,98	0,86	60,80	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	100
Labuhan Batu	21,80	1,09	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Asahan	20,18	0,00	78,68	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Simalungun	22,14	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Dairi	9,41	1,63	86,78	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Karo	27,18	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Deli Serdang	29,58	4,39	64,94	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	100
Langkat	32,54	6,72	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Nias Selatan	2,27	4,94	49,95	0,00	0,00	28,61	11,53	2,71	100
Humbahas	7,54	0,00	88,56	1,54	0,00	2,35	0,00	0,00	100
Pakpak Barat	21,65	0,00	60,05	0,00	0,00	13,82	2,77	1,70	100
Samosir	24,70	2,44	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Serdang Bedagai	26,80	1,07	69,08	1,14	0,74	1,17	0,00	0,00	100
Batu Bara	17,15	1,04	73,68	1,07	0,00	7,06	0,00	0,00	100
Paluta	9,25	0,90	76,80	0,00	0,93	6,71	3,24	2,17	100
Padang Lawas	3,53	0,00	83,89	1,97	0,00	8,82	0,00	1,79	100
Labusel	9,67	0,00	88,17	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	100
Labura	13,41	0,00	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Nias Utara	4,43	1,31	54,11	0,00	0,00	30,75	9,40	0,00	100
Nias Barat	4,04	0,00	65,35	0,00	2,34	21,56	1,17	5,55	100
Kota Sibolga	14,93	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Tanjung Balai	22,56	3,28	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
P. Siantar	24,74	1,29	71,49	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	100
Tebing Tinggi	24,48	1,10	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Medan	39,39	4,07	55,70	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	100
Binjai	36,94	3,59	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
P. Sidempuan	15,95	3,05	79,01	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	100
Gunung Sitoli	44,05	-	44,56	2,56	0,00	8,83	0,00	0,00	100
SUMUT	23,90	2,41	68,71	0,26	0,46	3,43	0,66	0,16	100

Lampiran 8. Persentase Balita yang Pernah Imunisasi dan Rata-rata Pemberian Asi Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016		2017	
	% Balita yang Pernah Imunisasi	Rata-Rata Pemberian Asi Eksklusif (Bulan)	% Balita yang Pernah Imunisasi	Rata-Rata Pemberian Asi Eksklusif (Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	85,95	3,53	83,58	4,57
Mandailing Natal	82,92	1,87	77,40	3,40
Tapanuli Selatan	72,70	4,00	75,31	4,34
Tapanuli Tengah	81,63	4,14	85,74	3,35
Tapanuli Utara	83,22	3,65	90,00	4,26
Toba Samosir	95,96	3,40	93,51	3,60
Labuhan Batu	83,93	4,41	80,80	3,26
Asahan	88,12	3,49	92,19	3,42
Simalungun	97,15	3,75	91,30	3,10
Dairi	92,88	3,90	95,85	3,37
Karo	94,20	3,61	94,93	3,29
Deli Serdang	92,97	3,58	91,76	4,62
Langkat	93,34	4,05	90,54	3,96
Nias Selatan	51,08	4,78	84,88	6,83
Humbahas	92,63	4,33	93,64	3,29
Pakpak Barat	99,20	3,26	98,62	3,55
Samosir	96,00	4,00	98,03	4,15
Serdang Bedagai	95,11	2,46	91,45	3,19
Batu Bara	86,00	2,88	87,16	3,48
Paluta	83,81	3,96	72,24	4,31
Padang Lawas	88,86	4,63	86,65	5,32
Labuhanbatu Selatan	82,03	4,66	81,96	3,69
Labuhanbatu Utara	91,14	3,94	94,23	3,68
Nias Utara	76,93	4,05	71,16	4,55
Nias Barat	83,26	4,51	74,65	4,49
Kota Sibolga	83,39	2,97	91,38	2,82
Kota Tanjung Balai	64,50	3,32	59,28	3,15
Kota P. Siantar	95,33	4,09	93,91	3,50
Kota Tebing Tinggi	94,48	3,96	85,95	4,25
Kota Medan	92,52	3,91	89,91	3,61
Kota Binjai	91,41	4,12	92,55	5,51
Kota P. Sidempuan	79,81	2,49	73,42	3,03
Kota Gunung Sitoli	95,07	3,35	85,86	4,48
SUMATERA UTARA	89,05	3,69	88,18	3,87

Lampiran 9. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016				2017			
	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	2,65	31,88	65,47	100	17,67	29,63	52,71	100
Mandailing Natal	0,08	26,59	73,33	100	0,51	26,36	73,13	100
Tapanuli Selatan	0,44	28,19	71,37	100	0,38	27,39	72,23	100
Tapanuli Tengah	0,16	28,71	71,13	100	1,69	29,00	69,31	100
Tapanuli Utara	0,00	29,17	70,83	100	0,80	28,07	71,13	100
Toba Samosir	0,26	26,28	73,46	100	1,22	25,17	73,61	100
Labuhan Batu	0,24	25,	74,76	100	1,13	24,49	74,39	100
Asahan	0,03	23,73	76,24	100	1,41	23,23	75,37	100
Simalungun	0,03	22,97	77,	100	1,93	22,15	75,92	100
Dairi	0,32	27,21	72,47	100	1,09	26,86	72,05	100
Karo	0,28	21,48	78,24	100	1,25	20,43	78,31	100
Deli Serdang	0,21	23,07	76,72	100	1,62	23,19	75,20	100
Langkat	0,05	22,09	77,86	100	0,79	21,78	77,43	100
Nias Selatan	6,33	30,88	62,8	100	25,20	31,66	43,14	100
Humbahas	0,07	29,07	70,86	100	0,85	28,87	70,29	100
Pakpak Barat	0,00	27,46	72,54	100	1,55	26,64	71,81	100
Samosir	0,01	27,16	72,83	100	1,70	26,54	71,76	100
Serdang Bedagai	0,08	22,72	77,2	100	1,41	21,13	77,46	100
Batu Bara	0,06	25,54	74,4	100	1,30	24,15	74,55	100
Paluta	0,07	27,19	72,73	100	0,96	25,82	73,22	100
Padang Lawas	0,11	26,93	72,96	100	0,72	26,62	72,65	100
Labusel	0,39	25,47	74,14	100	0,48	24,76	74,76	100
Labura	0,03	25,89	74,07	100	0,55	25,87	73,58	100
Nias Utara	0,71	32,83	66,47	100	9,02	32,62	58,37	100
Nias Barat	1,45	28,11	70,44	100	18,63	28,68	52,70	100
Kota Sibolga	0,00	23,58	76,42	100	0,83	23,07	76,10	100
Tanjung Balai	0,40	25,16	74,43	100	0,87	24,30	74,83	100
P. Siantar	0,04	24,69	75,27	100	0,08	24,94	74,99	100
Tebing Tinggi	0,26	22,25	77,49	100	1,46	21,00	77,54	100
Medan	0,13	24,4	75,47	100	0,53	26,44	73,03	100
Binjai	0,07	23,51	76,42	100	0,46	21,33	78,20	100
P. Sidempuan	0,00	29,29	70,71	100	0,28	28,24	71,48	100
Gunung Sitoli	0,30	27,38	72,32	100	4,83	27,35	67,82	100
SUMUT	0,31	24,85	74,84	100	1,96	24,76	73,28	100

Lampiran 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016				2017			
	SD	SMP	SMA	PT	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	98,25	79,55	61,95	7,94	98,86	79,14	65,00	6,91
Mandailing Natal	97,56	85,92	56,60	13,74	98,74	84,09	58,67	15,27
Tapanuli Selatan	98,50	80,88	63,02	18,21	99,06	78,10	64,02	16,31
Tapanuli Tengah	97,76	88,26	65,78	9,71	99,38	87,58	68,61	13,50
Tapanuli Utara	100,00	90,93	76,38	22,79	99,61	90,99	78,57	18,41
Toba Samosir	98,96	87,80	86,76	7,36	99,26	87,48	82,67	5,41
Labuhan Batu	99,01	87,37	63,30	11,31	97,32	86,83	64,65	13,26
Asahan	96,54	73,99	59,17	14,34	98,79	77,55	61,06	15,42
Simalungun	99,10	79,48	64,29	17,44	98,10	77,26	67,61	20,40
Dairi	98,96	90,43	80,52	13,74	99,53	87,94	80,95	10,71
Karo	99,35	83,47	76,25	14,56	98,44	81,47	77,45	12,01
Deli Serdang	98,54	69,17	70,27	18,81	95,73	72,52	67,84	18,12
Langkat	94,24	74,81	61,38	15,32	97,28	77,49	63,22	15,21
Nias Selatan	95,83	74,10	57,92	8,80	95,55	72,27	61,43	11,01
Humbahas	100,00	91,84	87,80	11,36	99,36	89,00	87,40	11,59
Pakpak Barat	99,46	93,10	77,30	1,35	99,21	88,40	78,53	3,57
Samosir	100,00	90,36	78,58	9,27	100,00	87,93	78,83	9,58
Serdang Bedagai	97,61	75,74	66,91	11,47	98,83	76,53	65,60	13,25
Batu Bara	96,98	74,28	62,21	16,15	99,33	72,19	63,86	12,94
Paluta	96,12	85,08	71,76	12,68	99,05	82,81	66,61	7,52
Padang Lawas	98,17	78,12	66,98	12,31	99,64	78,98	65,33	12,02
Labusel	98,01	83,94	76,72	22,72	98,31	85,57	72,25	17,51
Labura	96,97	75,22	67,29	13,59	99,06	73,82	67,24	11,70
Nias Utara	98,72	83,41	78,00	7,99	99,13	82,42	78,16	5,12
Nias Barat	100,00	83,32	85,45	4,76	99,55	84,53	84,42	6,12
Kota Sibolga	94,99	85,20	85,37	8,20	96,48	83,87	77,55	6,24
Tanjung Balai	97,44	81,47	72,90	13,60	98,63	78,03	72,48	10,01
P. Siantar	99,60	89,80	79,92	24,32	100,00	86,36	78,82	22,98
Tebing Tinggi	95,52	85,47	72,61	14,74	98,04	83,98	70,22	13,01
Medan	87,65	73,36	56,79	35,29	90,51	77,28	58,99	39,16
Binjai	99,46	79,37	74,60	27,04	99,65	77,64	70,88	26,98
P. Sidempuan	98,93	88,58	81,73	26,73	99,62	84,96	79,11	34,21
Gunung Sitoli	99,85	86,58	83,99	13,77	99,07	85,94	77,56	18,89
SUMUT	96,57	78,71	66,85	19,83	97,22	79,12	67,05	20,57

Lampiran 11. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kabupaten/kota, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	14 046,05	14 763,26	15 487,17	16 173,86	16 898,38
Mandailing Natal	15 670,71	16 499,11	17 340,04	18 228,76	19 149,94
Tapanuli Selatan	26 646,50	27 617,72	28 753,43	30 028,24	31 401,96
Tapanuli Tengah	15 492,03	15 925,38	16 394,41	16 900,84	17 454,37
Tapanuli Utara	15 323,72	15 960,47	16 596,78	17 151,46	17 731,96
Toba Samosir	23 550,24	24 390,83	25 327,82	26 397,14	27 535,66
Labuhan Batu	38 817,56	40 043,87	41 283,79	42 604,78	43 979,26
Asahan	27 272,67	28 587,26	29 898,81	31 301,68	32 732,37
Simalungun	24 003,50	25 110,73	26 258,51	27 511,14	28 764,98
Dairi	17 778,15	18 567,33	19 397,86	20 271,73	21 175,18
Karo	28 678,55	29 570,66	30 495,90	31 505,12	32 603,23
Deli Serdang	26 748,02	28 111,86	28 932,85	29 837,90	30 734,44
Langkat	22 094,90	23 019,81	24 000,36	25 003,53	26 085,04
Nias Selatan	10 666,25	11 004,19	11 370,11	11 763,47	12 183,71
Humbahas	17 238,44	17 987,41	18 617,32	19 348,07	20 136,24
Pakpak Barat	13 845,07	14 361,87	14 883,40	15 474,46	16 119,21
Samosir	18 245,05	19 234,57	20 226,18	21 171,50	22 197,19
Serdang Bedagai	23 756,29	24 870,06	26 026,25	27 264,69	28 578,47
Batu Bara	47 656,12	49 077,84	50 560,54	52 167,54	53 873,81
Paluta	24 274,39	25 186,82	26 123,86	27 119,75	28 068,89
Padang Lawas	23 035,42	23 805,76	24 579,29	25 498,07	26 353,88
Labuhanbatu Selatan	45 977,15	47 355,13	48 726,62	50 216,52	51 732,84
Labuhanbatu Utara	37 022,38	38 606,84	40 186,53	41 874,82	43 618,78
Nias Utara	13 313,60	13 962,29	14 594,22	15 138,64	15 684,40
Nias Barat	11 022,72	11 534,81	12 069,74	12 597,77	13 125,66
Kota Sibolga	30 358,95	31 999,49	33 670,92	35 293,31	37 025,80
Kota Tanjung Balai	25 560,43	26 674,27	27 765,75	29 006,56	30 229,20
Kota P. Siantar	29 413,00	30 984,52	32 304,02	33 589,80	34 790,38
Kota Tebing Tinggi	19 168,16	19 923,08	20 631,32	21 401,15	22 251,50
Kota Medan	51 041,87	53 636,49	56 214,87	59 236,74	62 173,47
Kota Binjai	22 831,52	23 841,40	24 826,32	25 888,50	26 978,85
Kota P. Sidempuan	15 378,22	15 919,86	16 464,77	17 081,17	17 731,90
Kota Gunung Sitoli	18 261,82	19 109,12	19 948,26	20 889,65	21 891,89
KAB/KOTA	29 237,88	30 538,85	31 769,04	33 125,15	34 492,02

**Lampiran 12. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,
2013-2017**

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	17,28	16,39	18,05	17,64	18,11
Mandailing Natal	9,62	9,28	11,13	10,98	11,02
Tapanuli Selatan	11,33	10,74	11,37	11,15	10,60
Tapanuli Tengah	15,41	14,47	15,00	14,58	14,66
Tapanuli Utara	11,68	11,06	11,41	11,25	11,35
Toba Samosir	9,54	9,23	10,21	10,08	10,19
Labuhan Batu	8,53	8,20	8,99	8,95	8,89
Asahan	11,60	10,98	12,09	11,86	11,67
Simalungun	10,45	10,20	10,96	10,81	10,65
Dairi	8,68	8,40	9,09	8,90	8,87
Karo	9,79	9,20	9,68	9,81	9,97
Deli Serdang	4,71	4,56	4,74	4,86	4,62
Langkat	10,44	9,99	11,30	11,36	11,15
Nias Selatan	18,83	17,81	19,05	18,60	18,48
Humbahas	10,00	9,44	9,85	9,78	9,85
Pakpak Barat	11,28	10,55	11,26	10,72	10,53
Samosir	14,01	13,20	14,11	14,40	14,72
Serdang Bedagai	9,35	8,98	9,59	9,53	9,30
Batu Bara	11,92	11,25	12,61	12,24	12,48
Paluta	10,28	9,60	10,97	10,87	10,70
Padang Lawas	8,59	8,03	8,73	8,69	9,10
Labuhanbatu Selatan	12,36	11,54	11,65	11,49	11,63
Labuhanbatu Utara	11,34	10,71	11,31	10,97	11,28
Nias Utara	30,94	29,28	32,62	30,92	29,06
Nias Barat	29,65	28,10	29,96	28,36	27,23
Kota Sibolga	12,90	12,26	13,48	13,30	13,69
Kota Tanjung Balai	14,85	14,02	15,08	14,49	14,46
Kota P. Siantar	10,93	10,35	10,47	9,99	10,10
Kota Tebing Tinggi	11,74	11,08	12,03	11,70	11,90
Kota Medan	9,64	9,12	9,41	9,30	9,11
Kota Binjai	6,75	6,38	7,03	6,67	6,75
Kota P. Sidempuan	9,04	8,52	8,77	8,32	8,25
Kota Gunung Sitoli	30,94	27,63	25,42	23,43	21,66

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Jl. Mayor M. Siddik, No. 37A - Aek Kanopan

E-mail: bps1223@bps.go.id, Homepage: <http://labuhanbatuutarakab.bps.go.id>

ISSN 2620-9330

